

PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026

DINAS
PERHUBUNGAN
KABUPATEN
SUKOHARJO



(0271) 593037



www.reallygreatsite.com



dishub@sukoharjokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Perubahan Renstra ini disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026 sehingga target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 dapat tercapai dengan baik.

Penyusunan Perubahan Renstra ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo untuk 5 (lima) tahunan dan dijadikan pedoman dalam menentukan program kerja tahunannya dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terimakasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyusunan Perubahan Renstra ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, anugerah dan hidayah-Nya.

Semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Sukoharjo, Juni 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

DAFTAR ISI

| | | | |
|-------------------|--|-------|--------------|
| DAFTAR ISI | | | |
| Kata Pengantar | | | i |
| Daftar Isi | | | ii |
| Bab I | Pendahuluan | | Bab I 1 |
| | 1.1 Latar Belakang | | Bab I 1 |
| | 1.2 Landasan Hukum | | Bab I 3 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan | | Bab I 8 |
| | 1.4 Sistematika Penulisan | | Bab I 10 |
| Bab II | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | | Bab II 1 |
| | 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | | Bab II 1 |
| | 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | | Bab II 7 |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | | Bab II 11 |
| | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | | Bab II 21 |
| Bab III | Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo | | Bab III 1 |
| | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo | | Bab III 1 |
| | 3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | | Bab III 3 |
| | 3.3 Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga | | Bab III 6 |
| | 3.4 Telaah Dinas Perhubungan Provinsi | | Bab III 6 |
| | 3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | | Bab III 9 |
| | 3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis | | Bab III 11 |
| Bab IV | Tujuan dan Sasaran | | Bab IV 1 |
| | 4.1 Tujuan | | Bab IV 1 |
| | 4.2 Sasaran | | Bab IV 1 |
| Bab V | Strategi dan Arah Kebijakan | | Bab V 1 |
| | 5.1 Strategi | | Bab V 1 |
| | 5.2 Arah Kebijakan | | Bab V 1 |
| Bab VI | Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan | | Bab VI 1 |
| Bab VII | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan | | Bab VII 1 |
| Bab VIII | Penutup | | Bab VIII 1 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya perubahan kelembagaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo berimbas pada perubahan Tugas dan Fungsi Pada masing masing Bidang. Serta terdapat penyesuaian Indikator berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah oleh karena itu maka diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis (renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

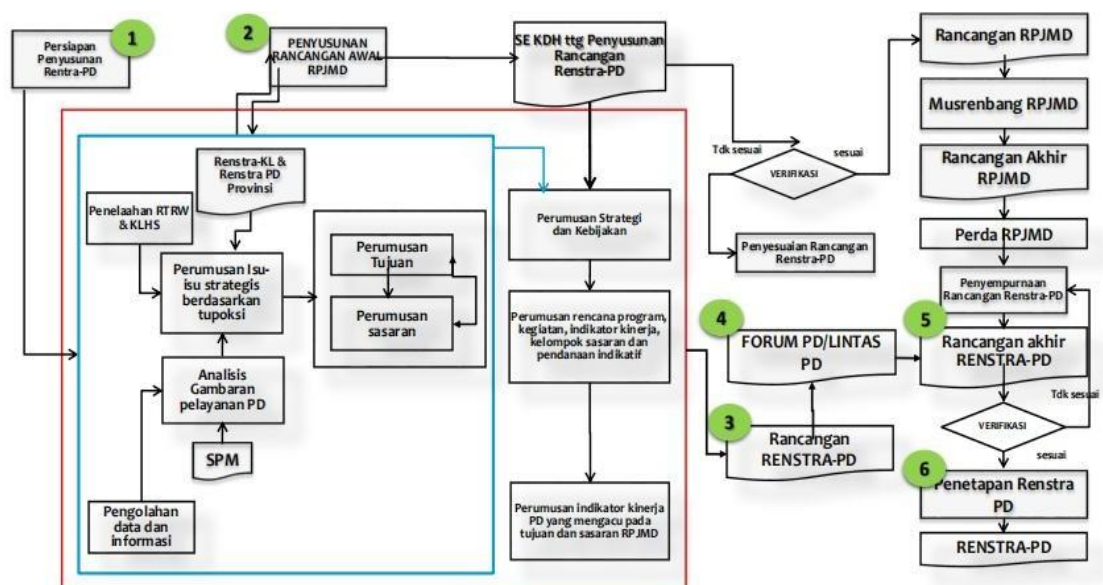
Selain hal tersebut di atas terdapat Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang telah melampaui target tahun berkenaan (Tahun 2022) atau sampai dengan akhir Renstra (Tahun 2026) juga mendasari untuk dilakukannya perubahan pada Rencana Strategis (renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

Perubahan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 diperlukan dikarenakan Rencana Strategis ini merupakan proses berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh secara profesional dan transparan.

Perubahan Rencana Strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra Kementerian, telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, telaahan hasil evaluasi Renstra lima tahun sebelumnya, dan telaahan RPJMD yang menjadi tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, yaitu urusan Perhubungan. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sasaran Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung peningkatan Infrastruktur Daerah yang berhubungan dengan Perhubungan guna meningkatkan kinerja sarana transportasi, meningkatkan kinerja prasarana transportasi dan meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik, serta pengoptimalan pendapatan yang berkaitan dengan perhubungan. Dengan demikian Dinas Perhubungan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai penyelenggara pemerintahan yang memegang teguh *good governance*.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021

- tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
 21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
 22. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
 23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179);
 24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 26. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 408);
 27. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1280);
 28. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang
 29. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
 30. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

Nomor 262);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
42. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
44. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74);
45. Surat Edaran Bupati No. 050/1565/2021 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.
46. Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 1997.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 adalah untuk penyesuaian dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dengan berbagai perubahan kondisi yang ada. Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 berisi arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya kurun waktu 5 (lima) tahun depan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026.

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Sukoharjo Tahun 2021-2026 secara transparan dan akuntabel;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang perhubungan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Dinas Perhubungan Kabupaten

Sukoharjo selama kurun waktu 2021-2026;

3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing stakeholder pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan daerah sekitar (Pemerintah Kabupaten/Kota berbatasan);
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Rencana Strategis kementerian/ lembaga, telaah Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi, telaah RTRW dan KLHS serta isu-isu strategis perhubungan di Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo disertai indikator kinerja selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan dicapai.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang merupakan indikator tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam bab IV serta memuat indikator kinerja penyelenggaraan bidang masing-masing di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting terkait pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
- b. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
 5. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya Kepala Dinas dibantu oleh struktur di bawahnya sebagai berikut :

- a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di

lingkungan Dinas Perhubungan. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan;
2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
3. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
4. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan;
5. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan;
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 sub bagian, yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

b. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan, penyediaan perlengkapan jalan di jalan, penerbitan izin penyelenggaraan, dan pembangunan fasilitas parkir, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. perumusan program kegiatan di bidang lalu lintas;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang lalu lintas;
3. penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLI),
4. pengelolaan prasarana lalu lintas, pengelolaan dan penertiban parkir;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Lalu Lintas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
2. Sub Koordinator Perlengkapan Jalan; dan
3. Sub Koordinator Perpajakan.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Lalu Lintas.

c. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu Daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, pengelolaan terminal Tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan bengkel dan karoseri, pengawasan dan pengelolaan fasilitas penyeberangan. Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

1. perumusan program kegiatan di bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
3. pengendalian operasional angkutan, terminal, dan fasilitas pendukung angkutan jalan;
4. penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
5. penetapan rencana umum jaringan trayek dalam satu Daerah;
6. penetapan wilayah operasi angkutan orang dan barang dalam Daerah;
7. penyelenggaraan angkutan orang dan barang dalam satu Daerah;
8. pembinaan pemilik kendaraan bermotor wajib uji, kendaraan tidak bermotor, bengkel dan karoseri;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan

10. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator terdiri atas:

1. Sub Koordinator Angkutan;
2. Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor; dan;
3. Sub Koordinator Perbengkelan.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor.

d. Bidang Operasi dan Pengendalian

Bidang Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengawasan dan penertiban lalu lintas, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan, penyelenggaraan perlintasan sebidang kereta api yang melintas di Daerah. Bidang Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

1. perumusan program kegiatan di bidang operasi dan pengendalian;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang operasi dan pengendalian;
3. pengoordinasian kegiatan pengawalan dan penertiban lalu lintas di bidang perhubungan;
4. penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan;
5. pembinaan kepada pengguna jalan terkait pemahaman fungsi sarana dan prasarana jalan;
6. pengoordinasikan penyelenggaraan perlintasan sebidang kereta api yang melintas di Daerah;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Operasi dan Pengendalian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator, terdiri atas:

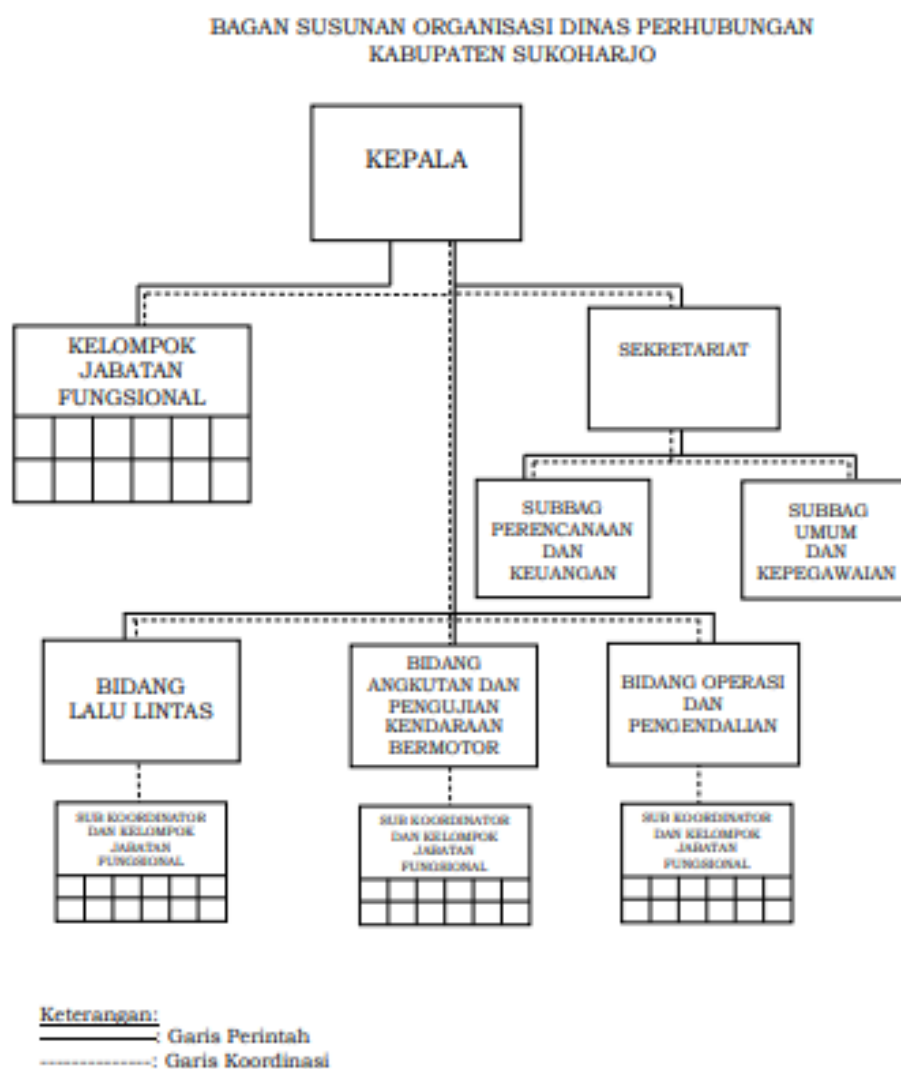
1. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
2. Sub Koordinator Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
3. Sub Koordinator Perkeretaapian.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sampai dengan 31 Mei 2023 memiliki komposisi pegawai sejumlah 43 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah Menurut Status :
 1. PNS (42 Orang)
 2. CPNS (1 Orang)
- b. Jumlah Menurut Stuktur :
 1. Kepala Dinas (1 Orang)
 2. Sekretariat (12 Orang)
 3. Bidang Lalu Lintas (12 Orang)
 4. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor (11 Orang)
 5. Bidang Operasi dan Pengendalian (6 Orang)
- c. Jumlah Menurut Pendidikan :
 1. Pasca Sarjana/S2 (6 Orang)
 2. Sarjana/S1/D4 (16 Orang)
 3. Sarjana Muda/D3 (8 Orang)
 4. SLTA/Sederajat (9 Orang)
 5. SLTP (1 Orang)
 6. SD (2 Orang)
- d. PNS Menurut Golongan :
 1. Golongan IV (8 Orang)
 2. Golongan III (23 Orang)
 3. Golongan II (13 Orang)
 4. Golongan I (- Orang)

2.2.2 Sumber Daya Modal

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pelayanannya memiliki sumber daya modal sebagaimana berikut :

- a. Tanah

| No | Jenis Barang/ Nama Barang | Letak/ Alamat | Penggunaan | Nilai(Rp) |
|----|----------------------------------|--|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tanah Bangunan Terminal Darat | Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo | Terminal Angkutan Sukoharjo | 860.000,00 |
| 2 | Tanah Bangunan Terminal Darat | Desa Kateguhan, Kel Tawang Sari, Kec Tawang Sari | Terminal Angkutan Tawang Sari | 560.000,00 |
| 3 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Rajawali No.7 Sukoharjo Desa Joho | Kantor Dinas Perhubungan | 450.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------|
| 4 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Desa Bekonang | Tanah Terminal Pasar Bekonang | 254.400,00 |
| 5 | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) | Sumbulan Kidul RT 3 RW 13 Makamhaji Kartasura | Underpass makam haji | 200.500,00 |
| | Total | | | 2.324.900.000 |

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2022)

b. Peralatan dan Mesin

| No | Jenis Barang | Jumlah Unit | Nilai (Rp) |
|----|---|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Alat besar darat lainnya lainnya(dst) | 1 | 752.496.000 |
| 2 | Pompa Air | 2 | 65.200.000 |
| 3 | Stasion Wagon | 8 | 1.469.940.250 |
| 4 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 1 | 24.500.000 |
| 5 | Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) | 1 | 119.600.000 |
| 6 | Truck + Attachment | 1 | 384.057.500 |
| 7 | Sepeda Motor | 21 | 372.760.000 |
| 8 | kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst) | 2 | 9.840.000 |
| 9 | kendaraan bermotor khusus lainnya (dst) | 1 | 987.792.000 |
| 10 | Gerobak Tarik | 1 | 5.000.000 |
| 11 | Perahu Penyeberangan | 1 | 67.925.000 |
| 12 | perkakas bengkel khusus lainnya (dst) | 2 | 59.390.000 |
| 13 | perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst) | 1 | 500.000.000 |
| 14 | alat ukur universal lainnya (dst) | 5 | 271.030.000 |
| 15 | alat ukur lain - lain lainnya (dst) | 2 | 33.000.000 |
| 16 | alat timbangan/biara lainnya (dst) | 1 | 99.000.000 |
| 17 | Alat Penguji Kendaraan Bermotor | 1 | 177.650.000 |
| 18 | alat ukur lainnya lainnya (dst) | 1 | 4.000.000 |
| 19 | Penyemprot Mesin (Power Sprayer) | 5 | 6.044.000 |
| 20 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi) | 2 | 2.830.000 |
| 21 | Mesin Ketik Listrik | 1 | 2.330.000 |
| 22 | Lemari Besi/Metal | 3 | 13.980.000 |
| 23 | Lemari Kayu | 5 | 31.701.380 |
| 24 | Rak besi | 3 | 63.712.000 |
| 25 | Rak kayu | 1 | 1.300.000 |
| 26 | Filing Cabinet Besi | 10 | 63.565.340 |
| 27 | Brandkas | 1 | 16.500.000 |
| 28 | Peti Uang/Cash Box/Coin Box | 2 | 5.520.000 |
| 29 | Rotary Filling | 1 | 29.800.000 |

| | | | |
|----|---|----|-------------|
| 30 | CCTV - Camera Control Television System | 5 | 68.725.000 |
| 31 | Alat Detektor Uang Palsu | 1 | 150.000 |
| 32 | Mesin Absensi | 1 | 6.000.000 |
| 33 | Alat Kantor Lainnya | 10 | 51.150.000 |
| 34 | Meja Kerja Besi/Metal | 1 | 17.000.000 |
| 35 | Meja Kerja Kayu | 11 | 82.249.500 |
| 36 | Kursi Besi/Metal | 1 | 8.400.000 |
| 37 | Kursi Kayu | 1 | 2.065.000 |
| 38 | Sice | 1 | 1.296.000 |
| 39 | Bangku Panjang Besi/Metal | 1 | 4.500.000 |
| 40 | Meja Rapat | 3 | 13.900.000 |
| 41 | Meja Resepsionis | 1 | 2.450.000 |
| 42 | Meja Panjang | 1 | 4.700.000 |
| 43 | Kursi Rapat | 4 | 35.050.000 |
| 44 | Kursi Tamu | 3 | 13.375.000 |
| 45 | Kursi Putar | 5 | 27.460.000 |
| 46 | Kursi Biasa | 2 | 8.580.000 |
| 47 | Bangku Tunggu | 2 | 4.500.000 |
| 48 | Kursi Lipat | 2 | 2.075.000 |
| 49 | Meubeleur lainnya | 1 | 4.500.000 |
| 50 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 1 | 2.500.000 |
| 51 | Mesin Pemotong Rumput | 2 | 8.250.000 |
| 52 | Lemari Es | 1 | 2.430.000 |
| 53 | A.C. Window | 2 | 23.700.000 |
| 54 | A.C. Split | 10 | 101.285.000 |
| 55 | Kipas Angin | 2 | 6.980.000 |
| 56 | Exhause Fan | 1 | 4.000.000 |
| 57 | Kompore Gas (Alat Dapur) | 1 | 1.300.000 |
| 58 | Rice Cooker (Alat Dapur) | 2 | 1.100.000 |
| 59 | Kitchen Set | 1 | 11.000.000 |
| 60 | Tabung Gas | 1 | 630.000 |
| 61 | Alat Dapur lainnya | 1 | 200.000 |
| 62 | Televisi | 7 | 37.249.000 |
| 63 | Amplifier | 1 | 550.000 |
| 64 | Sound System | 2 | 29.175.000 |
| 65 | Wireless | 1 | 9.930.000 |
| 66 | Megaphone | 1 | 1.650.000 |
| 67 | Microphone Floor Stand | 1 | 475.000 |
| 68 | Mic Conference | 1 | 1.100.000 |
| 69 | Unit Power Supply | 4 | 12.215.000 |
| 70 | Stabilisator | 1 | 1.500.000 |
| 71 | Camera Video | 3 | 33.400.000 |

| | | | |
|-----|---|----|-------------|
| 72 | Camera film | 1 | 2.250.000 |
| 73 | Tangga Aluminium | 1 | 1.350.000 |
| 74 | Dispenser | 4 | 13.925.00 |
| 75 | Handy Cam | 1 | 9.800.000 |
| 76 | Karpet | 1 | 420.000 |
| 77 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 13 | 89.057.500 |
| 78 | Alat Pemadam/Portable | 1 | 2.000.000 |
| 79 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 6.700.000 |
| 80 | Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II | 1 | 5.500.000 |
| 81 | Meja Tamu Biasa | 1 | 3.300.000 |
| 82 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 2.700.000 |
| 83 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 5.420.000 |
| 84 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 3 | 9.220.000 |
| 85 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 1 | 4.080.000 |
| 86 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II | 2 | 23.362.500 |
| 87 | Buffet Kayu | 1 | 13.712.500 |
| 88 | Buffet Kaca | 1 | 2.550.000 |
| 89 | Audio Mixing Portable | 2 | 8.925.000 |
| 90 | Microphone/Wireless MIC | 3 | 10.450.000 |
| 91 | Camera Electronic | 1 | 9.750.000 |
| 92 | Layar Film/Projector | 1 | 7.700.000 |
| 93 | LCD Monitor | 1 | 1.417.500 |
| 94 | Kamera Udara | 1 | 23.250.000 |
| 95 | Telephone Mobile | 1 | 6.000.000 |
| 96 | Handy Talky (HT) | 7 | 102.400.000 |
| 97 | Facsimile | 1 | 2.000.000 |
| 98 | alat komunikasi telephone lainnya (dst) | 1 | 1.200.000 |
| 99 | Finger Printer Time and Attendance Acces Control System | 1 | 4.592.000 |
| 100 | alat komunikasi khusus lainnya (dst) | 2 | 6.748.550 |
| 101 | Portable Router | 2 | 16.996.000 |
| 102 | Papan Panel | 1 | 3.900.000 |
| 103 | Layar Proyektor | 1 | 1.675.000 |
| 104 | Komputer Jaringan lainnya | 1 | 20.000.000 |
| 105 | P.C Unit | 21 | 296.138.230 |
| 106 | Laptop | 18 | 336.424.400 |
| 107 | Note Book | 1 | 4.620.000 |
| 108 | Tablet PC | 1 | 6.000.000 |
| 109 | Personal Komputer lainnya | 3 | 106.048.000 |
| 110 | Card Reader (Peralatan Mini Komputer) | 1 | 8.061,120 |
| 111 | Monitor | 3 | 7.035.000 |
| 112 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 27 | 186.856.500 |
| 113 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 1 | 5.950.000 |

| | | | |
|-----|--|-----|-----------------------|
| 114 | Keyboard (Peralatan Personal Komputer) | 1 | 500.000 |
| 115 | External/ Portable Hardisk | 2 | 3.850.000 |
| 116 | Peralatan Personal Komputer lainnya | 2 | 8.022.000 |
| 117 | Router | 1 | 850.000 |
| 118 | Modem | 2 | 1.650.000 |
| 119 | Peralatan Jaringan lainnya | 1 | 9.435.000 |
| 120 | Genset | 1 | 60.000.000 |
| 121 | Traffic Light | 26 | 5.727.720.280 |
| 122 | rambu bersuar lainnya (dst) | 16 | 1.824.593.250 |
| 123 | Rambu Jalan | 307 | 1.084.313.650 |
| 124 | Rambu Papan Tambahan | 48 | 303.494.750 |
| 125 | Rambu Cermin | 9 | 103.598.000 |
| 126 | Rambu-rambu Larangan | 5 | 6.457.200 |
| 127 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 38 | 97.579.200 |
| 128 | Guardrail | 4 | 234.724.000 |
| 129 | rambu tidak bersuar lainnya (dst) | 61 | 3.904.069.290 |
| | Total | | 21.039.549.370 |

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2022)

c. Gedung dan Bangunan

| No | Rincian | Nilai (Rp.) |
|----|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1.726.787.750 |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 696.598.900 |
| 3 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Darurat | 3.297.105.000 |
| 4 | Bangunan Gedung Terminal Lain-lain | 90.135.000 |
| 5 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | 208.082.500 |
| 6 | Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (dst) | 60.500.000 |
| 7 | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 15.748.756.740 |
| 8 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 572.725.140 |
| | Total | 22.400.691.030 |

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2022)

d. Aset Tetap Lainnya

| No | Rincian | Nilai (Rp.) |
|----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lain-lain | 638.327.490 |
| 2 | Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain | 917.138.310 |
| 3 | Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain | 336.122.500 |
| 4 | Instalasi gardu listrik lainnya | 298.920.000 |
| 5 | Lain-lain | 821.065.860 |
| 6 | Jaringan Distribusi Lain-lain | 4.671.458.000 |
| 7 | Jaringan listrik lainnya | 700.366.500 |
| | Total | 8.383.398.660 |

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2022)

e. Aset Tetap Lainnya

| No | Rincian | Nilai (Rp.) |
|--------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Alat Musik Nasional/ Daerah | 10.573.000 |
| 2 | Perangkat Lunak Sistem Operasi | 240.018.000 |
| Total | | 250.591.000 |

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2022)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah yang menggambarkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan target/sasaran Rencana Strategis 2021-2026 menurut indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota secara umum realisasi kinerja pelayanan perhubungan Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2022 secara spesifik telah terangkum dalam **tabel 2.3.1**, **tabel 2.3.2** dan **tabel 2.3.3** sebagai berikut :

Tabel 2.3.1

CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN S/D TAHUN 2022 TRIWULAN IV

| No | Sasaran/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir RPJMD 2026 | Realisasi 2021 | 2022 | | Persentase Capaian s/d Triwulan IV | Status Capaian RPJMD | PD Penanggung Jawab |
|----------|--|--|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Target | Realisasi s/d Triwulan IV | | | |
| 1 | Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah Yang Baik | Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan | Rasio | 0,290 | 0.310 | 0.305 | 0 | - | belum dilaksanakan penghitungan | Dinas Perhubungan |
| 1.1 | Meningkatnya kinerja sarana transportasi | Persentase angka kecelakaan sarana transportasi | Percent | 24 | 26.5 | 26 | 0 | - | belum dilaksanakan penghitungan | |
| 1.1.1 | <i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)</i> | <i>Prosentase kendaraan bermotor wajib uji</i> | <i>Percent</i> | <i>71.8</i> | <i>70.3</i> | <i>70,60</i> | <i>67,78</i> | <i>96.00</i> | <i>akan tercapai</i> | |
| | | <i>Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum</i> | <i>Percent</i> | <i>11.98</i> | <i>10.27</i> | <i>10.27</i> | <i>10.75</i> | <i>104.67</i> | <i>tercapai</i> | |
| 1.1.2 | <i>Program Pengelolaan Pelayanan</i> | <i>Prosentase kinerja layanan penyeberangan sungai</i> | <i>Percent</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>-</i> | <i>Perlu upaya keras</i> | |
| 1.2 | Meningkatnya kinerja prasarana transportasi | Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi | Percent | 0,50 | 2 | 1,50 | 0 | - | belum dilaksanakan penghitungan | |
| 1.2.1 | <i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)</i> | <i>Prosentase Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan</i> | <i>Percent</i> | <i>86</i> | <i>81</i> | <i>82</i> | <i>65</i> | <i>79.27</i> | <i>akan tercapai</i> | |
| 1.2.2 | <i>Program Pengelolaan Perkeretaapian</i> | <i>Prosentase kinerja layanan perkeretaapian</i> | <i>Percent</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>36.23</i> | <i>36.23</i> | <i>Perlu upaya keras</i> | |
| 2 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Responsif | Predikat SAKIP | Predikat | A | | B | 0 | - | hasil belum diketahui | |
| 2.1 | Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public | Nilai SAKIP | Percent | 79 | | 66 | 0 | - | hasil belum diketahui | |
| 2.1.1 | <i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah</i> | <i>Unit</i> | <i>4</i> | | <i>4</i> | <i>3</i> | <i>75.00</i> | <i>akan tercapai</i> | |

Ket:

Status Capaian RPJMD diisi:

Telah Tercapai : Persentase Capaian s/d Triwulan I 100%

Akan Tercapai : Persentase Capaian s/d Triwulan I 40 - 99,99 %

Perlu Upaya Keras : Persentase Capaian s/d Triwulan I 0 - 39,99 %

Catatan:

1. Capaian Program disajikan per urusan, jadi jika PD mampu 2 urusan dijadikan 2 tabel

2. Capaian Kinerja tidak boleh kosong, jika triwulan I belum ada data , diisi data terakhir

TABEL Tabel 2.3.2

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 2 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

| NO | INDIKATOR KINERJA | RUMUS | REALISASI KINERJA | |
|-----------|---|---|-------------------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ANGKUTAN JALAN | | | |
| 1.1.1 | Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota | $\frac{\text{Jumlah Jaringan jalan kabupaten/kota terlayani angkutan umum}}{\text{Jumlah Total jaringan jalan kabupaten/ kota}} \times 100\%$ | 0,1026895 | 0,1026895 |
| 1.1.2 | Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang | $\frac{\text{Jumlah Jaringan trayek daerah tertinggal/terpencil terlayani angkutan umum dalam suatu kabupaten/kota}}{\text{Jumlah Total jaringan trayek daerah tertinggal/terpencil pada kabupaten/kota}} \times 100\%$ | - | - |
| 1.2.1 | Tersedianya Jaringan Prasarana Angkutan Jalan (Halte) | $\frac{\text{Jumlah Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota}}{\text{Jumlah Total Kebutuhan halte pada setiap kabupaten/kota}} \times 100\%$ | 1 | 0,4666667 |
| 1.2.2 | Tersedianya Jaringan Prasarana Angkutan Jalan (terminal) | $\frac{\text{Jumlah Tersedianya terminal Penumpang pada setiap kabupaten/kota}}{\text{Jumlah Total Kebutuhan Terminal Penumpang pada setiap kabupaten/kota}} \times 100\%$ | 1 | 1 |
| 1.3 | Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota | $\frac{\text{Jumlah Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan yang terpasang pada setiap kabupaten/kota}}{\text{Jumlah Total Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada setiap kabupaten/kota}} \times 100\%$ | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--------|---------|-------|
| 1.4 | Tersedianya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor | $\frac{\text{Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji}}{4000 \text{ Kendaraan Wajib Uji}}$ | x 100% | 1,30825 | 1,259 |
| 1.5 | Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota. | $\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum (Perkotaan/Pedesaan) memenuhi Standar Keselamatan}}{\text{Jumlah Total Angkutan Umum pada setiap kabupaten/kota}}$ | x 100% | 1 | 1 |
| II. ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU | | | | | |
| 2.1 | Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari terhadap total jaringan trayek dalam kabupaten/kota | $\frac{\text{Jumlah Jaringan trayek terlayani angkutan sungai dan danau}}{\text{Jumlah Total jaringan trayek pada kabupaten/kota}}$ | x 100% | | |
| 2.2 | Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam kabupaten/kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari dalam kabupaten/kota terhadap total kebutuhan kapal sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota | $\frac{\text{Jumlah kapal danau yang melayani trayek dalam kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total kebutuhan kapal sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota}}$ | x 100% | | |
| 2.3 | Tersedianya jaringan prasarana angkutan sungai dan danau | $\frac{\text{Jumlah pelabuhan sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total kebutuhan pelabuhan sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota}}$ | x 100% | | |
| 2.4 | | Jumlah Kapal sungai dan danau yang telah memenuhi standar keselamatan dalam satu kabupaten/kota | x 100% | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Terpenuhinya standar keselamatan kapal sungai dan danau | Jumlah total kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam satu kabupaten/kota | | | |
|---|---|--|--|--|

Tabel 2.3.3

ASPEK DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN TINGKAT OUTCOME PEMERINTAH DAERAH

PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD DAN PMJMD, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RPJPD, RPJMD, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | RUMUS | REALISASI KINERJA | |
|--------------------|---|---|-------------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PERHUBUNGAN | | | | |
| 1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah. | 24.120 | 24.120 |
| 2 | Rasio ijin trayek | Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi Jumlah penduduk | 0.000017 | 0.000044 |
| 3 | Jumlah uji kir angkutan umum | Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan | 218 | 296 |
| 4 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | 4 | 4 |
| 5 | Persentase layanan angkutan darat | Jumlah angkutan darat dibagi Jumlah penumpang angkutan darat x100% | | |
| 6 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n Jumlah angkutan umum pada Tahun n x100% | 80 | 80 |
| 7 | Pemasangan Rambu rambu | Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n dibagi Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia x100% | 1.0743802 | 1 |
| 8 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Panjang Jalan dibagi Jumlah Kendaraan | 0.53 | 0.55 |
| 9 | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum | 741.600 | 973.281 |

| | | | | |
|----|--|--|--------|--------|
| 10 | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun | 64.800 | 64.800 |
|----|--|--|--------|--------|

Disamping indikator kinerja pelayanan dasar di bidang perhubungan yang mengacu pada Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, secara spesifik pelayanan di bidang perhubungan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis pelayanan sebagai berikut :

2.3.1 Pelayanan Terminal

Pelayanan terminal yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo ada 4 terminal tipe C dari 6 terminal yang ada di Kabupaten Sukoharjo, karena 2 terminal ber tipe B yang pengelolaannya ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

| NO | JUMLAH TERMINAL | REALISASI KINERJA | |
|----|-----------------|-------------------|------|
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terminal Tipe B | - | - |
| 2 | Terminal Tipe C | 4 | 4 |

2.3.2 Pelayanan Izin Trayek

Pada Tahun 2021-2022 pelayanan izin trayek yang sekarang dialihkan pada DPMPSTSP cenderung bertambah, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

| NO | PELAYANAN IZIN TRAYEK | REALISASI KINERJA | |
|----|------------------------------|-------------------|------|
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Izin Trayek yang dikeluarkan | 16 | 40 |

2.3.3 Pelayanan Perusahaan Angkutan

Pelayanan perusahaan angkutan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan sinyal positif tentang adanya kenaikan produktifitas industri angkutan yang ada. Walaupun perusahaan angkutan yang eksis didominasi oleh perusahaan angkutan barang, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

| NO | JUMLAH PERUSAHAAN TRANSPORTASI | REALISASI KINERJA | |
|----------|--------------------------------|-------------------|----------|
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Angkutan Pariwisata | 4 | 7 |
| 2 | Angkudes | 1 | 1 |
| 3 | AKDP | - | - |
| 4 | AKAP | 1 | 1 |
| 5 | Angkutan Barang | 11 | 14 |

2.3.4 Pelayanan Perbengkelan

Pelayanan perbengkelan yang semakin baik, dapat diketahui dengan semakin meningkatnya jumlah bengkel yang ada di Wilayah Sukoharjo yang telah memenuhi standar minimal pelayanan yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

| NO | PELAYANAN PERBENGKELAN | REALISASI KINERJA | |
|----------|------------------------|-------------------|----------|
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jumlah Perbengkelan | 135 | 147 |

2.3.5 Pelayanan Penumpang Angkutan Umum

Pelayanan penumpang angkutan umum setiap pada awal tahun 2022 mengalami kenaikan dengan adanya penambahan rute Batik Trans Solo yang melewati wilayah Kabupaten Sukoharjo pada Koridor 5 dan 6. Hal ini menambah jumlah trayek yang terlayani angkutan umum. Rincian layanan penumpang angkutan umum dapat dilihat dalam tabel berikut :

| NO | JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM | REALISASI KINERJA | |
|----------|--------------------------------|-------------------|----------|
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | AKDP | 259.560 | 366.027 |
| 2 | AKAP | 296.640 | 386.313 |
| 3 | Perkotaan | - | - |
| 4 | Angkudes | 185.400 | 219.941 |

2.3.6 Pelayanan Fasilitas Keselamatan Jalan

Pelayanan fasilitas keselamatan jalan setiap tahunnya cenderung semakin baik, hal ini terlihat dari jumlah pengadaan fasilitas keselamatan jalan yang meningkat setiap tahunnya. Terutama dalam pengadaan

Alat Penerangan Jalan sebagai salah satu cara Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi komitmen meningkatkan layanan keselamatan jalan. Rincian layanan fasilitas keselamatan jalan dapat dilihat pada tabel berikut :

| NO | JENIS | SATUAN | REALISASI KINERJA | |
|----|------------------|----------------|-------------------|------|
| | | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rambu | Unit | 110 | 126 |
| 2 | Marka Jalan | m ² | 875M | 829M |
| 3 | Flashing Light | Unit | 4 | 6 |
| 4 | Pagar Pengaman | M | 7 | 21 |
| 5 | Cermin Cembung | Buah | 6 | 6 |
| 6 | RPPJ | Unit | 2 | 4 |
| 7 | Traffic Cone | Unit | - | - |
| 8 | Barikade LL | Unit | 75 | - |
| 9 | Water Barrier | Unit | - | - |
| 10 | Deliniator | Unit | - | - |
| 11 | Concrete Barrier | Unit | - | - |
| 12 | PJU | Unit | | 20 |

2.3.7 Pelayanan Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan mengalami kenaikan yang teratur setiap tahunnya, hal ini menunjukkan semakin baiknya pengelolaan perpustakaan dimana semakin banyaknya titik lokasi parkir yang dikelola pemerintah, disamping akan meningkatkan keteraturan tentunya juga semakin meningkatkan pendapatan daerah dari sector retribusi perpustakaan. Rincian layanan perpustakaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

| NO | PELAYANAN PERPARKIRAN | REALISASI KINERJA | |
|----|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jumlah Lokasi Parkir Yang di Kelola | 334 titik | 341 titik |
| 2 | Jumlah Petugas Parkir | 395 orang | 431 orang |

2.3.8 Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor

Pelayanan uji kendaraan bermotor pada umumnya mengalami kenaikan yang baik. Secara rinci data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

| NO | PELAYANAN KIR | REALISASI KINERJA | |
|----|-----------------------------------|-------------------|------|
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jumlah Kendaraan Melaksanakan KIR | 169 | 259 |

2.3.9 Pelayanan Keselamatan Transportasi Jalan (Jumlah Kecelakaan)

Pelayanan keselamatan transportasi jalan pada umumnya cenderung naik apabila dilihat dari jumlah kecelakaan yang terjadi. Akan tetapi apabila dilihat dari dampak fatalitasnya, angka fatalitas kecelakaan yang ditunjukkan dari jumlah korban kecelakaan yang meninggal dunia (MD) secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi sinyal positif pengelolaan keselamatan transportasi jalan yang semakin baik. Secara rinci data tersebut dapat pada tabel 2.3.9 dan 2.3.10 .

| NO | ANGKA KECELAKAAN | REALISASI KINERJA | |
|----|-------------------|-------------------|------|
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jumlah Kecelakaan | 1135 | 1527 |

2.3.10 Pelayanan Keselamatan Transportasi Jalan (Jumlah Fatalitas Kecelakaan)

| NO | KORBAN KECELAKAAN | REALISASI KINERJA | |
|----|-------------------|-------------------|------|
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meninggal Dunia | 94 | 90 |
| 2 | Luka Berat | 1 | 3 |
| 3 | Luka Ringan | 1333 | 1876 |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Perhubungan dapat diketahui dengan menganalisis isu strategis serta target kinerja pada Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Tahun 2018-2023, RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 serta Kebijakan RTRW dan KLHS Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan telaahan yang dilakukan dapat disimpulkan tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Tantangan perangkat daerah dalam periode Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun ke 2 sebagai berikut :

- Peningkatan mobilitas masyarakat yang massif pasca pandemic Covid-19;
- Munculnya titik simpul kemacetan;

- c. Meningkatnya area rawan kecelakaan (black spot);
- d. Menurunnya jumlah trayek yang terlayani angkutan umum;
- e. Kondisi kendaraan angkutan umum yang semakin tidak representatif;
- f. Sistem pelayanan umum di sektor perhubungan yang belum terintegrasi secara maksimal;
- g. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang belum maksimal sesuai kebutuhan;
- h. Belum maksimalnya ketersediaan dan fungsi terminal;
- i. Belum tersedianya ruang parkir dan bongkar muat bagi truk muatan besar yang terpusat dan terkendali;
- j. Belum maksimalnya penerapan andalalin di daerah dengan adanya Sentral Bisnis terbangun yang belum menyusun analisa dampak lalu lintas;
- k. Kondisi dan umur alat uji kendaraan bermotor yang sudah tua/ usang;
- l. Belum maksimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah;

2.4.2 Peluang

Peluang perangkat daerah dalam periode Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun ke 2 sebagai berikut :

- a. Berkurangnya secara signifikan kasus Covid-19 pada tahun 2021 dan 2022 memberikan kemudahan dalam berkoordinasi secara tatap muka ;
- b. Telah tersedianya ATCS di beberapa titik simpang sebagai pengurai kemacetan;
- c. Intensifnya sosialisasi keselamatan berkendara kepada masyarakat;
- d. Masih terlayananya 6 trayek pedesaan dan mulai disusunnya rencana umum jaringan trayek kabupaten sebagai database perencanaan jaringan trayek;
- e. Meningkatnya kesadaran pemilik KBWU untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor;
- f. Potensi pengembangan aplikasi pelayanan sektor perhubungan yang masih bisa berkembang;
- g. Telah adanya *masterplan* kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan dan ketersediaan anggaran yang memadai;
- h. Potensi pengembangan jaringan trayek;
- i. Adanya upaya pihak swasta untuk membangun pos terminal barang sendiri guna mengakomodir distribusi barang ke kawasan perkotaan serta adanya potensi pembangunan terminal barang tersentraliasi oleh pemerintah;
- j. Meningkatnya pembangunan sentra bisnis yang mengajukan rekomendasi andalalin;

- k. Adanya potensi anggaran guna modernisasi alat uji kendaraan bermotor;
- l. Adanya potensi pendapatan retribusi parkir di beberapa lokasi yang masih dapat ditingkatkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil cukup baik. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya indikator pembangunan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan, baik dari eksternal maupun internal.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Identifikasi permasalahan diperlukan untuk menentukan program yang tepat guna mengatasi masalah yang ditemukan. Identifikasi permasalahan didapat dari berbagai sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain hasil evaluasi RPJMD dan RKPD, LPPD dan LKPJ serta telaahan dari akademisi. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dikelompokkan menurut pelayanan yang diselenggarakan pada masing-masing Bidang seperti terangkum pada **tabel 3.1** berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

| Aspek Kajian dan Capaian Kinerja | Standar Ukuran | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan PD |
|--|----------------|---|---|--|
| | | Internal | Eksternal | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pelayanan Bidang Lalu Lintas | | | | |
| Prosentase Ketersediaan Rambu Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan : 93% | IKU | ✓ Keterbatasan personel operasional pemeliharaan; ✓ Modernisasi aplikasi pengelolaan Fasilitas perlengkapan keselamatan jalan; ✓ Kurangnya personel yang mempunyai disiplin ilmu di bidang perhubungan. | ✓ Aksi vandalisme terhadap fasilitas jalan yang terpasang; ✓ Faktor cuaca alam dan bencana alam. | ✓ Personel operasional pemeliharaan belum mencukupi untuk memonitoring dan menyelesaikan permasalahan rambu di wilayah secara tepat waktu; ✓ Kurangnya personel yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan pengadaan sering kali terhambat. |

| Aspek Kajian dan Capaian Kinerja | Standar Ukuran | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan PD |
|--|----------------|--|--|--|
| | | Internal | Eksternal | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pelayanan Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor | | | | |
| Tingkat ketersediaan trayek yang terlayani angkutan umum : 44% | IKU | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah penerbitan izin trayek baru; ✓ Update database trayek angkutan umum; ✓ Kurangnya personel yang mempunyai disiplin ilmu di bidang perhubungan. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Minat masyarakat menggunakan angkutan umum; ✓ Kondisi angkutan umum yang tidak representatif; ✓ Pemindahan Terminal tipe B ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih terbatasnya kajian terkait perencanaan pengelolaan angkutan umum; ✓ Belum tersedianya angkutan bersubsidi baik melalui mekanisme APBD ataupun CSR, dan baru 2 jalur yang terlayani oleh BST yang pendanaannya berasal dari Pusat; ✓ Keterbatasan anggaran untuk pengelolaan angkutan umum. |
| Tingkat kelayakan angkutan orang dan barang : 85% | IKU | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keterbatasan lahan parkir tunggu uji kendaraan bermotor; ✓ Modernisasi fasilitas pengujian kendaraan bermotor. | Kurangnya kesadaran pemilik KBWU untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi; |
| Pelayanan Bidang Pengendalian Operasi | | | | |
| Pengolahan data keselamatan | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbatasnya tenaga ahli yang berasal dari internal terkait pengolahan data keselamatan | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perolehan data kecelakaan berasal dari instansi lain (data kepolisian) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kesulitan dalam penyusunan dokumen keselamatan lalu lintas |
| Kinerja layanan perkeretaapian | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah perlintasa yang tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengaman perlintasan kereta api | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perlintasan sebidang pada Wilayah Kab. Sukoharjo bersinggungan dengan PT KAI yang pengelolaannya harus menunggu ijin dari PT KAI | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki sarana ataupun prasarana pengaman yang memadai |

| | | | | |
|--|-----|---|--|--|
| Pelayanan Kesekretariatan | | | | |
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah : CC (63) | IKU | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedianya data kinerja pelayanan PD; ✓ Tersedianya data pendukung yang lengkap; ✓ Ketepatan laporan kinerja tiap bidang/ seksi. | ✓ Penilaian Inspektorat Kabupaten Sukoharjo. | ✓ Tidak tepat waktunya pengumpulan data kinerja dari bidang/seksi. |

Secara umum, penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo berjalan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan yang menjadi *concern* dan perlu diantisipasi yaitu dampak dari pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat sementara panjang jalan tidak bertambah serta kondisi angkutan umum yang semakin tidak diminati masyarakat.

3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati Sukoharjo menetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 yang menjadi bagian dari tujuan terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang maju, aman, konstitusional, mantap, unggul dan rapi. Adapun visi pembangunan Tahun 2021-2026 adalah :

“ Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur ”

Penjabaraan Visi tersebut telah diuraikan dalam **tabel 3.2**, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penjabaran Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

| Visi | Penjabaran | Indikator |
|-----------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| Maju | Maju merupakan pelaksanaan pembangunan menuju ke arah yang lebih baik. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks pembangunan manusia; ✓ Pertumbuhan ekonomi; ✓ Indeks pembangunan infrastruktur. |
| Aman | Aman mengandung arti terhindar dari ancaman lahir dan batin secara individu dan kelompok. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks ketahanan daerah/ indeks resiko bencana. |
| Konstitusional | Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks reformasi birokrasi. |
| Mantap | Warga masyarakat dan segenap penyelenggara Pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat pengangguran terbuka; ✓ Pendapatan perkapita; ✓ Angka kemiskinan. |
| Unggul | Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks ketentraman masyarakat. |
| Rapi | Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib dan beres. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ IKLH. |

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan ke dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi;
4. Memperkuat pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan; dan

Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada kurun waktu tahun 2021-2026 akan melaksanakan misi ke 4 (empat) yaitu **“Memperkuat pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan”**. Misi ini dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur berkelanjutan yaitu peningkatan infrastruktur yang termodernisasikan sesuai dengan perkembangan era digitalisasi di masa sekarang dan di masa depan yang hadir di masyarakat dalam rangka meningkatkan akses bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas perekonomian kerakyatan. Peningkatan infrastruktur dilakukan bersinergi dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditentukan serta keberlanjutan kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya misi tersebut didukung oleh tujuan pertama dari misi

ke 4 (empat) **“Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan”** dengan indikator kinerja indeks pembangunan infrastruktur (IPI) kemudian didukung oleh sasaran pertama dari tujuan pertama dalam misi ke 4 (empat) **“Meningkatnya kualitas infrastruktur”** dengan indikator kinerja indeks fatalitas. Keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD dengan tupoksi Dinas Perhubungan adalah penyediaan dan peningkatan infrastruktur perhubungan, maksudnya seperti penyediaan traffic light, ATCS, warning light, pelican crossing, cermin tikung, guard rill, marka jalan, shelter, halte, terminal, alat uji kendaraan bermotor serta rambu keselamatan jalan lainnya. Dengan penyediaan infrastruktur perhubungan yang semakin lengkap dan termodernisasikan diharapkan rasio angka fatalitas kecelakaan sektor perhubungan yang menjadi target tujuan Renstra Dinas Perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo dapat selalu ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya, serta Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Sukoharjo yang menjadi indikator kinerja tujuan dari misi ke 4 (empat) RPJMD akan semakin meningkat serta Indeks Fatalitas yang menjadi sasaran dari tujuan RPJMD tersebut akan semakin menurun. Adapun Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang telah diuraikan dalam **tabel 3.3** berikut :

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

| Visi : “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur” | | | |
|---|--|--|---|
| Misi , Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati | Permasalahan Pelayanan | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| <p>Misi :</p> <p>Memperkuat pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan</p> <p>Tujuan :</p> <p>Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya kualitas infrastruktur</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Munculnya titik kemacetan lalu lintas; ✓ Munculnya <i>black spot</i> rawan kecelakaan; ✓ Menurunnya jumlah trayek yang terlayani angkutan umum; ✓ Kondisi angkutan umum yang tidak representatif; ✓ Sistem pelayanan perhubungan yang belum terintegrasikan dengan maksimal. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum terbangunnya ATCS secara merata; ✓ Kerusakan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan akibat faktor manusia (vandalisme) dan faktor alam (bencana dan reaksi kimia cuaca); ✓ Belum maksimalnya pengadaan Fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sudah tersedianya ATCS di beberapa titik simpang; ✓ Ketersediaan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan; ✓ Masih terlayannya 6 (enam) jalur trayek angkutan pedesaan; ✓ Meningkatnya Kesadaran Pemilik KBWU untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor; |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perlengkapan keselamatan jalan sesuai kebutuhan; ✓ Belum maksimalnya pengelolaan angkutan sesuai RUJT; ✓ Usia kendaraan angkutan yang sudah tua; ✓ Aplikasi pelayanan perhubungan yang belum maksimal. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Potensi aplikasi yang masih bisa berkembang. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nilai akuntabilitas perangkat daerah yang masih kategori “CC”. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum maksimalnya pengukuran data kinerja perangkat daerah. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyusunan Renstra baru PD dengan indikator kinerja yang lebih terukur dan selaras. |

3.3 Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga

Tujuan dan Sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor transportasi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan program pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Terdapat 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran Kementerian Perhubungan yang terkait dengan arah pembangunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 di bidang/ urusan perhubungan dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubunagn Tujuan dan sasaran tersebut telah diuraikan pada **tabel 3.4** sebagai berikut :

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian

| No | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|--|--|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 | | | | |
| 1 | Meningkatnya kinerja layanan transportasi | | | |
| 1.1 | Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan | | | |
| 1.1.1 | Presentase Peningkatan Kapasitas Sarana Perhubungan | Semakin berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi | Usia kendaraan angkutan umum yang sudah tua dan tidak representative | ✓Telah terencanaannya konsep pembaharuan angkutan umum beserta trayek yang dilayani |

| No | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|------------|--|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1.1.2 | Prosentase peningkatan kapasitas prasarana perhubungan | Belum maksimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan | Belum meratanya fasilitas atcs serta adanya faktor eksternal yaitu faktor alam (bencana dan reaksi kimia) dan faktor manusia (vandalisme) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedianya anggaran untuk melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan ✓ Telah adanya masterplan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan |
| 1.2 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan | | | |
| 1.2.1 | Presentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan | Menurunnya pelayanan angkutan umum pada trayek yang tersedia | Minat masyarakat menggunakan angkutan umum yang rendah serta kemudahan akses mempunyai kendaraan pribadi yang fungsi gunanya lebih praktis | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah terencananya update RUJT angkutan; ✓ Kerjasama aglomerasi angkutan umum yang bersifat mutualisme. |
| 2 | Berkurangnya Rasio Kejadian Kecelakaan dan Gangguan Keamanan dalam Setiap Pelayanan Jasa Transportasi | | | |
| 2.1 | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Perhubungan | | | |
| 2.1.1 | Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional | Belum maksimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelalaian pengguna jalan ketika berkendara; ✓ Adanya kenadaraan angkutan yang tidak melaksanakan wajib uji kendaraan bermotor. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dilaksanakannya sosialisasi tentang keselamatan berkendara baik untuk masyarakat umum, juru mudi angkutan dan pengusaha angkutan umum |
| 3 | Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perhubungan | | | |
| 3.1 | Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan | | | |
| 3.1.1 | Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) Kementerian Perhubungan | Nilai akuntabilitas PD yang masih kategori "CC". | Belum maksimalnya pengukuran data kinerja OPD. | Pembaruan rencana kerja berupa renstra OPD dengan indikator yang lebih terukur dan terkait. |

3.4 Telaah Dinas Perhubungan Provinsi

Tujuan dan Sasaran pembangunan beserta indikator sektor transportasi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Terdapat 1 (satu) tujuan dan 1 (satu sasaran) yang berkaitan arah pembangunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan. Adapun tujuan dan sasaran tersebut telah diuraikan dalam **tabel 3.5** berikut :

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

| No | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dishub Provinsi | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|--|---|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 | | | | |
| 1 | Memantapkan Sistem Transportasi yang Berorientasi ada Konektivitas antar Kawasan Pengembangan di Provinsi Jawa Tengah | | | |
| 1.1 | Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi | | | |
| 1.1.1 | Presentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi | Belum maksimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan | Belum meratanya fasilitas atcs serta adanya faktor eksternal yaitu faktor alam (bencana dan reaksi kimia) dan faktor manusia (vandalisme) | ✓ Tersedianya anggaran untuk melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan; Telah adanya masterplan kebutuhan fasilitas perlengkapan di jalan Kabupaten Sukoharjo |

3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo memastikan bahwa rencana program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan selalu mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai prinsip kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo RTRW dan KLHS ditampilkan pada **tabel 3.6** berikut :

Tabel 3.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap RTRW dan KLHS

| No | Kebijakan RTRW dan KLHS | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|-----|---|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | RTRW | | | |
| 1 | Arah Pengembangan Struktur Ruang | | | |
| 1.2 | Sistem jaringan prasarana | | | |
| 1 | Pembangunan prasarana terminal penumpang terminal tipe b di Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Sukoharjo | Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah | Tidak menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Sukoharjo | Tersedianya 2 unit terminal tipe b di Kec. Kartasura dan Kec. Sukoharjo |
| 2 | Pembangunan prasarana terminal tipe c di Kec.Tawang Sari, Kec.Sukoharjo, Kec.Weru, Kec.Bendosari, Kec.Polokarto, Kec.Baki, Kec.Bulu, Kec.Weru, dan Kec.Nguter | Belum meratanya pembangunan terminal tipe c | Menurunnya jumlah angkutan pada jaringan trayek yang terlayani dan potensi penggunaan angkutan umum rendah terlihat dari 11 jaringan trayek hanya 6 jaringan trayek yang terlayani angkutan umum | Tersedianya 4 unit terminal tipe c di Kec. Sukoharjo, Kec.Mojolaban, Kec.Tawang Sari dan Kec. Weru |
| 3 | Pengembangan rel ganda (double track) Solo-Yogyakarta yang melintasi Kec. Gatak, Baki dan Kartasura | Kewenangan Kementerian Perhubungan | Belum adanya setplan perencanaan tata kelola tersebut | Telah dibangunnya rel ganda (double track) dijalur tersebut |
| 4 | Pengembangan rel ganda (double track) Solo-Yogyakarta yang melintasi Kec.Mojolaban | Kewenangan Kementerian Perhubungan | Belum adanya setplan perencanaan tata kelola tersebut | Telah dibangunnya rel ganda (double track) dijalur tersebut |
| 5 | Pengembangan kereta api komuter jalur Solo- Sukoharjo- Wonogiri | Kewenangan PT KAI | Tidak menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Sukoharjo | Telah terlayani jalur kereta api tersebut |
| 6 | Peningkatan prasarana penunjang Stasiun Kec.Sukoharjo, Kec.Nguter dan Stasiun Gawok di Kec.Gatak | Kewenangan PT KAI | Tidak menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Sukoharjo | Telah tersedianya fasilitas penunjang yang memadai |
| 7 | Pembangunan terminal barang di Kec.Kratasura, Kec.Gatak, Kec.Grogol, Kec.Nguter dan Kec.Mojolaban | Belum tersedianya ruang parkir dan bongkar muat bagi truk muatan besar yang terpusat dan terkendali | Belum tersusunnya setplan perencanaan dan tata kelola terminal barang | Adanya upaya pihak swasta untuk membangun terminal barang sendiri guna mengakomodir distribusi barang ke kawasan perkotaan |
| 8 | Peningkatan sarana dan prasarana penyeberangan sungai di Desa Gadingan Kec.Mojolaban dan Desa Baran Kec. Nguter | Pemeliharaan sarana dan prasarana dari faktor alam seperti bencana banjir, angin kencang dan lain-lain | Telah dibangunnya akses jembatan yang menghubungkan 2 wilayah di kawasan tersebut sehingga pelayanan penyeberangan sungai dihentikan | Terdapat 1 fasilitas penyeberangan sungai yang masih beroperasi di Desa Gadingan Kec. Mojolaban |

| No | Kebijakan RTRW dan KLHS | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|-----|---|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| II | KHLS | | | |
| 1 | Pemenuhan sarana dan prasarana wilayah | Belum memiliki indikator panjang jalur kereta api dalam target daerah | Kewenangan PT Kereta Api dalam rangka pengadaran infrastruktur rel kereta | Infrastruktur rel kereta yang ada masih berfungsi dengan baik |
| 2 | Pengendalian efek gas rumah kaca dari emisi gas buang kendaraan angkutan bermotor | Perlunya modernisasi alat uji sehingga pelayanan menjadi lebih maksimal | Masih banyaknya kendaraan yang tidak melaksanakan uji kendaran bermotor | Akreditasi B pada Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Sukoharjo |

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional, maupun regional. Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan, Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Implikasi RTRW dan KLHS yang telah diidentifikasi terhadap pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Rumusan isu strategis dapat ditentukan sebagai berikut:

1. *World Health Organization* (WHO) menempatkan kecelakaan lalu lintas sebagai urutan ketiga penyebab kematian manusia tertinggi di dunia (*Global Status Report on Road Safety*, WHO, 2019) dengan total kematian 2,4 juta jiwa per tahun dan Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang kasus tertinggi dengan total kematian 26.000 - 29.000 jiwa setiap tahunnya;
2. Persaingan pasar otomotif mendorong kemudahan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga menyumbang salah satu faktor penyebab kemacetan yaitu pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkendali, sementara daya tampung jalan sudah tidak memadai dan sulit dikembangkan. Selain itu, untuk alasan praktis dan ekonomis disertai menurunnya pelayanan dan fasilitas angkutan umum setiap tahunnya, mengakibatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum semakin menurun.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merupakan pondasi kinerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dijadikan tolok ukur utama dalam rangka mewujudkan kinerja RPJMD Kabupaten Sukoharjo melalui sasaran ke 1 (satu) dari misi ke 4 (empat). Hal ini merupakan suatu konsekuensi yang saling terkait dalam bagan rangkaian kinerja. Keterkaitan kinerja Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo maupun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dalam **gambar 4.0**.

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang akan dijalankan serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Adapun pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik”, dengan indikator tujuan Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan pada akhir tahun 2026 diharapkan tercapai **0,290**, sedangkan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo harapan pada akhir tahun 2026 tercapai **0,180**

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur” dari tujuan “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan” dari Misi ke 4 (empat) “Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan”.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, terdapat beberapa sasaran yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja sarana transportasi, dengan indikator persentase angka kecelakaan sarana transportasi pada tahun 2026 sebesar **0,50%** pada Rencana Strategis Dinas

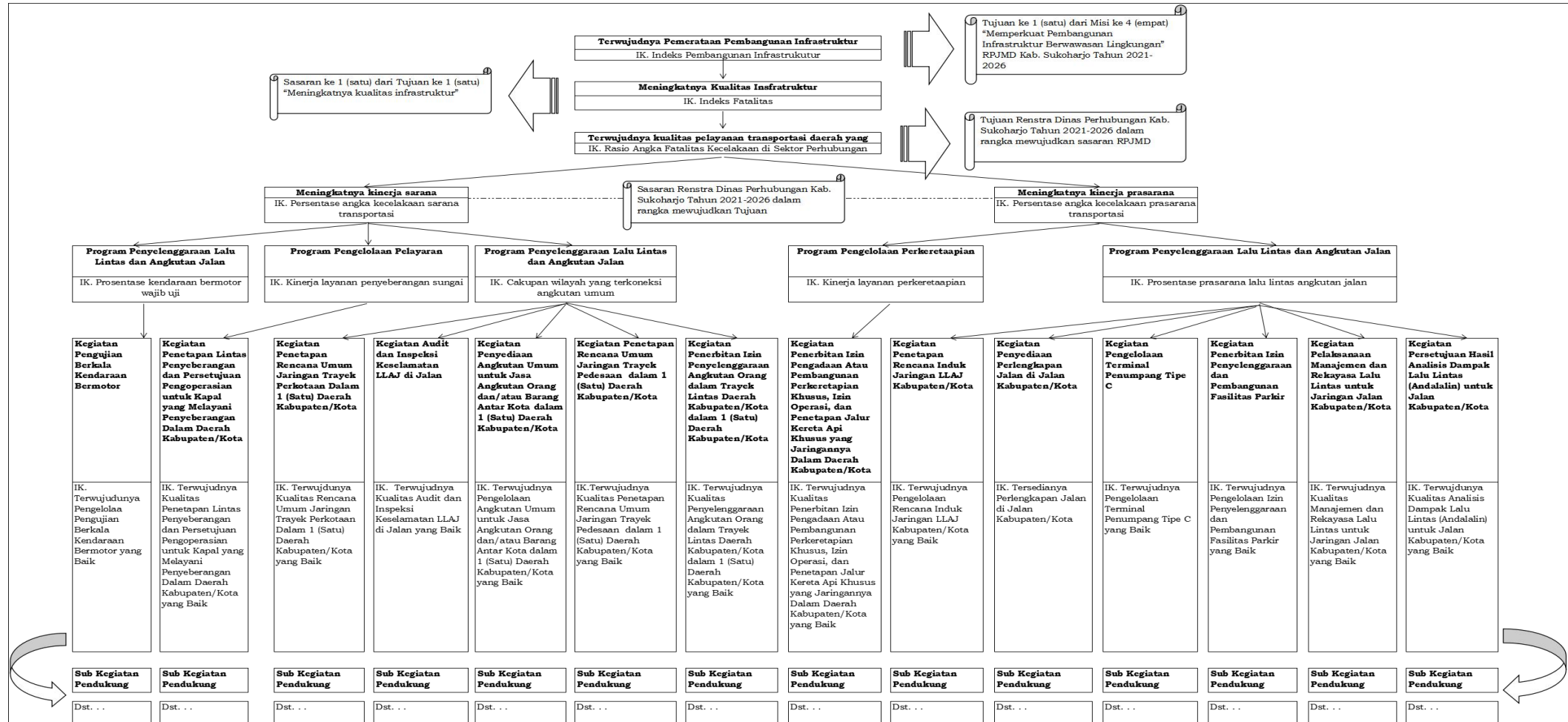
Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, sedangkan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo harapan pada akhir tahun 2026 tetap **0,50%**.

2. Meningkatnya kinerja prasarana transportasi, dengan indikator persentase angka kecelakaan prasarana transportasi pada tahun 2026 sebesar **24%** pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, sedangkan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo harapan pada akhir tahun 2026 tercapai **17,5%**.

Adapun target indikator tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo diuraikan dalam **tabel 4.1.**, sedangkan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo digambarkan pada **table 4.2**

Gambar 4.0

Keterkaitan Kinerja Renstra Dinas Perhubungan Terhadap RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026



Tabel 4.1

Indikator Tujuan Dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|---|---|--|--------------|----------------|-------|--------|-------|--------|---------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik | | Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan | 0,270 | 0,310 | 0,305 | 0,300 | 0,296 | 0,292 | 0,290 |
| | | Meningkatnya kinerja sarana transportasi | Persentase angka kecelakaan sarana transportasi | 0,25% | 2% | 1,50% | 1,25% | 1% | 0,75% | 0,50% |
| | | Meningkatnya kinerja prasarana transportasi | Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi | 23,50% | 26,50% | 26% | 25,50% | 25% | 24,50% | 24% |

Tabel 4.2

Indikator Tujuan Dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|---|---|--|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik | | Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan | 0,270 | 0,310 | 0,305 | 0,195 | 0,190 | 0,185 | 0,180 |
| | | Meningkatnya kinerja sarana transportasi | Persentase angka kecelakaan sarana transportasi | 0,25% | 2% | 1,50% | 0,90% | 0,85% | 0,75% | 0,50% |
| | | Meningkatnya kinerja prasarana transportasi | Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi | 23,50% | 26,50% | 26% | 19% | 18,5% | 18% | 17,5% |

Sementara itu, untuk indikator tujuan dan sasaran jangka menengah berkaitan dengan kesekretariatan sebagai berikut :

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|--------|---|------------------------------|--------------|----------------|------|------|------|------|------|---------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| | | Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik | Nilai SAKIP | 61 | 63 | 66 | 70 | 75 | 77 | 79 | |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

5.1 Strategi

Strategi adalah rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Visi Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara efektif dan efisien.

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan di sektor perhubungan;
2. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Meningkatkan operasional pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
4. Meningkatkan kinerja angkutan.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dirumuskan sebagai penghubung antara strategi dan sasaran yang lebih operasional, sehingga akan memperjelas strategi yang lebih spesifik, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga membantu mengarahkan prioritas pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Kebijakan yang akan dikembangkan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan terminal dan parkir;
4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan rekomendasi andalalin;
5. Peningkatan pengendalian dan pengamanan serta penegakan

- hukum lalu lintas dan angkutan jalan;
6. Pembinaan dan pengawasan angkutan;
 7. Peningkatan layanan uji kendaraan bermotor.

Adapun keterkaitan hubungan bagaimana strategi dan arah kebijakan menjadi faktor pendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo serta Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih diruaikan dalam **tabel 5.1** berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

| Visi : “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur” | | | |
|--|---|--|--|
| Misi ke 4 (empat) : Memperkuat Pembangunan Infratsruktur yang Berwawasan Lingkungan | | | |
| Tujuan (1) | Sasaran (2) | Strategi (3) | Arah Kebijakan (4) |
| Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik | Meningkatnya kinerja sarana transportasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan di sektor perhubungan; 2. Meningkatkan operasional pengendalian dan pengamanan lalu lintas; 3. Meningkatkan kinerja angkutan. | Tahun I s.d Tahun V : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perencanaan manajemen angkutan jalan; 2. Peningkatan pengendalian dan pengamanan serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan; 3. Pembinaan dan pengawasan angkutan; 4. Peningkatan layanan uji kendaraan bermotor. |
| | Meningkatnya kinerja prasarana transportasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan di sektor perhubungan; 2. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. | Tahun I s.d Tahun V : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 2. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan; 3. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan terminal dan perparkiran; 4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan rekomendasi andalalin. |

Tabel 5.2**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kesekretariatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo**

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik | <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas perencanaan Dinas Perhubungan;2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan monitoring capaian kinerja;3. Meningkatkan kualitas evaluasi capaian kinerja. | Tahun I s.d Tahun V : <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan;2. Peningkatan SOP pengawasan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja;3. Pembentukan Tim Teknis Khusus berdasarkan SK Kepala Dinas dalam rangka pengawasan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja. |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif tahun 2021-2026 selaras dan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang diuraikan sebagaimana **tabel 6.1**, sedangkan untuk Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada **tabel 6.2** berikut:

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|---|-------------------------------------|---|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | Tahun n-1 | | Tahun n-2 | | Tahun n-3 | | Tahun n-4 | | Tahun n-5 | | Tahun n-6 | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Terwujudnya kualitas pelayanan transportasi daerah yang baik | | | | Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan | 0,270 | 0,310 | 32.221.610.000 | 0,305 | 32.991.340.000 | 0,300 | 37.641.210.000 | 0,296 | 41.760.630.000 | 0,292 | 45.051.090.000 | 0,290 | 47.306.690.000 |
| | Meningkatnya kinerja sarana transportasi | | | Prosentase angka kecelakaan sarana transportasi | 0,25% | 2% | 3.312.280.000 | 1,50% | 3.391.400.000 | 1,25% | 3.632.590.000 | 1% | 4.292.850.000 | 0,75% | 4.648.660.000 | 0,50% | 4.862.960.000 |
| | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Prosentase kendaraan bermotor wajib uji | 70% | 70,30% | 1.684.080.000 | 70,60% | 1.724.310.000 | 70,90% | 1.888.920.000 | 71,20% | 2.182.640.000 | 71,50% | 2.363.540.000 | 71,80% | 2.472.500.000 |
| | | | Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 100% | 100% | 1.684.080.000 | 100% | 1.724.310.000 | 100% | 1.888.920.000 | 100% | 2.182.640.000 | 100% | 2.363.540.000 | 100% | 2.472.500.000 |
| | | | Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah pemilik bengkel umum dan karoseri serta para pemilik kendaraan tidak bermotor yang mengikuti sosialisasi | 45 Orang | 45 Orang | 22.500.000 | 50 Orang | 25.000.000 | 55 Orang | 27.500.000 | 60 Orang | 30.500.000 | 65 Orang | 35.000.000 | 70 Orang | 40.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah alat uji yang lulus uji kalibrasi | 9 Unit | 9 Unit | 1.607.080.000 | 9 Unit | 1.638.795.000 | 9 Unit | 1.794.420.000 | 9 Unit | 2.075.140.000 | 9 Unit | 2.238.540.000 | 9 Unit | 2.322.500.000 |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah pemilik kendaraan wajib uji yang mengikuti sosialisasi | 45 Orang | 45 Orang | 32.000.000 | 50 Orang | 35.515.000 | 55 Orang | 39.500.000 | 60 Orang | 45.000.000 | 65 Orang | 50.000.000 | 70 Orang | 60.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah kendaraan angkutan di terminal-terminal dan garasi PO Bus yang melaksanakan uji petik | 95 Unit | 95 Unit | 22.500.000 | 100 Unit | 25.000.000 | 105 Unit | 27.500.000 | 110 Unit | 32.000.000 | 115 Unit | 40.000.000 | 120 Unit | 50.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|--|--|-------------------------------------|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | | Tahun n-1 | | Tahun n-2 | | Tahun n-3 | | Tahun n-4 | | Tahun n-5 | | Tahun n-6 | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum | 10,27% | 10,27% | 1.605.700.000 | 10,27% | 1.644.050.000 | 10,27% | 1.717.200.000 | 11,00% | 2.081.050.000 | 11,49% | 2.253.540.000 | 11,98% | 2.357.430.000 |
| | | | Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ | 100% | 100% | 725.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 795.000.000 | 100% | 945.000.000 | 100% | 1.073.540.000 | 100% | 1.125.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah operasi pelaksanaan penertiban angkutan umum yang dilaksanakan | 115 Kali | 115 Kali | 660.000.000 | 120 Kali | 680.000.000 | 125 Kali | 715.000.000 | 130 Kali | 845.000.000 | 135 Kali | 948.540.000 | 140 Kali | 985.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah sopir/Jurumudi yang mengikuti sosialisasi | 25 Orang | 25 Orang | 45.000.000 | 30 Orang | 50.000.000 | 35 Orang | 55.000.000 | 40 Orang | 60.000.000 | 45 Orang | 75.000.000 | 50 Orang | 80.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Pengelola Angkutan Umum yang mengikuti sosialisasi | 25 Orang | 25 Orang | 20.000.000 | 30 Orang | 20.000.000 | 35 Orang | 25.000.000 | 40 Orang | 40.000.000 | 45 Orang | 50.000.000 | 50 Orang | 60.000.000 |
| | | | Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Prosentase Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 100% | 500.700.000 | 100% | 512.050.000 | 100% | 522.200.000 | 100% | 636.050.000 | 100% | 657.000.000 | 100% | 690.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengamanan harian dan insidentil yang diselenggarakan | 185 Kali | 185 Kali | 500.700.000 | 187 Kali | 512.050.000 | 189 Kali | 522.200.000 | 192 Kali | 636.050.000 | 195 Kali | 657.000.000 | 197 Kali | 690.000.000 |
| | | | Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 160.000.000 | 100% | 205.000.000 | 100% | 213.000.000 | 100% | 220.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kajian manajemen pengelolaan angkutan yang diadakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 110.000.000 | 1 Dokumen | 150.000.000 | 1 Dokumen | 155.000.000 | 1 Dokumen | 160.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|--|--|-------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | Tahun n-1 | | Tahun n-2 | | Tahun n-3 | | Tahun n-4 | | Tahun n-5 | | Tahun n-6 | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah database pelayanan angkutan yang terupdate | 1 Database | 1 Database | 50.000.000 | 1 Database | 50.000.000 | 1 Database | 50.000.000 | 1 Database | 55.000.000 | 1 Database | 58.000.000 | 1 Database | 60.000.000 |
| | | | Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 207.000.000 | 100% | 212.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen RUJT dan SK Bupati tentang RUJT yang diadakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 130.000.000 | 1 Dokumen | 135.000.000 | 1 Dokumen | 137.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sosialisasi dan Uji coba implementasi RUJT yang dilaksanakan | 8 Kali | 8 Kali | 50.000.000 | 10 Kali | 50.000.000 | 12 Kali | 52.000.000 | 15 Kali | 70.000.000 | 17 Kali | 72.000.000 | 20 Kali | 75.000.000 |
| | | | Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 80.000.000 | 100% | 82.000.000 | 100% | 88.000.000 | 100% | 95.000.000 | 100% | 103.000.000 | 100% | 110.430.000 |
| | | | Sub Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah perizinan yang terfasilitasi | 25 Izin | 25 Izin | 50.000.000 | 27 Izin | 52.000.000 | 30 Izin | 55.000.000 | 32 Izin | 60.000.000 | 34 Izin | 65.000.000 | 35 Izin | 70.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan yang dilaksanakan | 6 Kali | 6 Kali | 30.000.000 | 7 Kali | 30.000.000 | 8 Kali | 33.000.000 | 10 Kali | 35.000.000 | 11 Kali | 38.000.000 | 12 Kali | 40.430.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|--|--|-------------------------------------|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | | | Tahun n-1 | | Tahun n-2 | | Tahun n-3 | | Tahun n-4 | | Tahun n-5 | | Tahun n-6 | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Program Pengelolaan Pelayaran penyeberangan sungai | Kinerja layanan penyeberangan sungai | 100% | 100% | 22.500.000 | 100% | 23.040.000 | 100% | 26.470.000 | 100% | 29.160.000 | 100% | 31.580.000 | 100% | 33.030.000 |
| | | | Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 22.500.000 | 100% | 23.040.000 | 100% | 26.470.000 | 100% | 29.160.000 | 100% | 31.580.000 | 100% | 33.030.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perahu yang dilakukan pemeliharaan | 1 Unit | 1 Unit | 22.500.000 | 1 Unit | 23.040.000 | 1 Unit | 26.470.000 | 1 Unit | 29.160.000 | 1 Unit | 31.580.000 | 1 Unit | 33.030.000 |
| | Meningkatnya kinerja prasarana transportasi | | | Prosentase angka kecelakaan prasarana transportasi | 23,50% | 26,50% | 28.909.330.000 | 26,00% | 29.599.940.000 | 25,50% | 34.008.620.000 | 25% | 37.467.780.000 | 24,50% | 40.402.430.000 | 24% | 42.443.730.000 |
| | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Prosentase prasarana lalu lintas angkutan jalan | 80% | 81% | 28.837.330.000 | 82% | 29.526.220.000 | 83% | 33.923.920.000 | 84% | 37.374.460.000 | 85% | 40.301.380.000 | 86% | 42.338.020.000 |
| | | | Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 310.000.000 | 100% | 325.000.000 | 100% | 630.000.000 | 100% | 680.000.000 | 100% | 810.000.000 | 100% | 925.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah kajian manajemen lalu lintas yang diadakan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 150.000.000 | 3 Dokumen | 150.000.000 | 5 Dokumen | 300.000.000 | 5 Dokumen | 320.000.000 | 6 Dokumen | 400.000.000 | 6 Dokumen | 450.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi keselamatan lalu lintas | 4000 Orang | 4000 Orang | 70.000.000 | 4250 Orang | 75.000.000 | 6000 Orang | 200.000.000 | 6500 Orang | 220.000.000 | 7000 Orang | 250.000.000 | 8500 Orang | 300.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi wahana tata nagraha yang dilaksanakan | 6 Kali | 6 Kali | 90.000.000 | 7 Kali | 100.000.000 | 8 Kali | 130.000.000 | 9 Kali | 140.000.000 | 10 Kali | 160.000.000 | 11 Kali | 175.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | Tahun n-1 | | Tahun n-2 | | Tahun n-3 | | Tahun n-4 | | Tahun n-5 | | Tahun n-6 | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Prosentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 27.272.330.000 | 100% | 27.861.220.000 | 100% | 31.268.920.000 | 100% | 34.524.460.000 | 100% | 36.066.380.000 | 100% | 36.868.020.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah pagar pengaman jalan yang diadakan | 70 Meter | 70 Meter | 90.000.000 | 72 Meter | 100.000.000 | 80 Meter | 150.000.000 | 88 Meter | 170.000.000 | 100 Meter | 200.000.000 | 120 Meter | 250.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah titik pju yang dilakukan pemeliharaan | 3000 Titik | 3000 Titik | 26.372.330.000 | 3200 Titik | 26.816.220.000 | 3500 Titik | 29.518.920.000 | 4000 Titik | 32.594.460.000 | 4500 Titik | 33.450.000.000 | 5000 Titik | 33.868.020.000 |
| | | | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah rambu keselamatan jalan yang dilakukan pemeliharaan | 1250 Unit | 1250 Unit | 310.000.000 | 1275 Unit | 345.000.000 | 1285 Unit | 600.000.000 | 1295 Unit | 660.000.000 | 1305 Unit | 900.000.000 | 1310 Unit | 1.000.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Luas marka jalan dan zona aman selamat sekolah yang diadakan | 5240 m2 | 5240 m2 | 500.000.000 | 5320 m2 | 600.000.000 | 7400 m2 | 1.000.000.000 | 7550 m2 | 1.100.000.000 | 8150 m2 | 1.516.380.000 | 8350 m2 | 1.750.000.000 |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 100% | 100% | 370.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 550.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 840.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pembangunan Terminal | Jumlah Terminal/ Shelter/ Halte yang dibangun | 0 Unit | 2 Unit | 145.000.000 | 2 Unit | 150.000.000 | 3 Unit | 200.000.000 | 3 Unit | 220.000.000 | 4 Unit | 350.000.000 | 4 Unit | 390.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah terminal tipe c yang dilakukan pemeliharaan | 4 Unit | 4 Unit | 225.000.000 | 4 Unit | 250.000.000 | 4 Unit | 300.000.000 | 4 Unit | 330.000.000 | 4 Unit | 400.000.000 | 4 Unit | 450.000.000 |
| | | | Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 100% | 100% | 200.000.000 | 100% | 220.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 330.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 515.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah petugas parkir yang mengikuti sosialisasi | 850 Orang | 850 Orang | 200.000.000 | 875 Orang | 220.000.000 | 900 Orang | 300.000.000 | 925 Orang | 330.000.000 | 930 Orang | 450.000.000 | 950 Orang | 515.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|--|---|-------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | Tahun n-1 | | Tahun n-2 | | Tahun n-3 | | Tahun n-4 | | Tahun n-5 | | Tahun n-6 | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota | Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota | 100% | 100% | 640.000.000 | 100% | 670.000.000 | 100% | 1.170.000.000 | 100% | 1.230.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | 100% | 3.110.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Rambu Keselamatan Jalan dan ATCS yang diadakan | 118 Unit | 118 Unit | 550.000.000 | 121 Unit | 570.000.000 | 123 Unit | 1.050.000.000 | 125 Unit | 1.100.000.000 | 127 Unit | 2.000.000.000 | 130 Unit | 2.950.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah kasus lalu lintas yang diselesaikan dalam koordinasi lalu lintas antar stakeholder bidang perhubungan | 6 Kasus | 6 Kasus | 90.000.000 | 6 Kasus | 100.000.000 | 6 Kasus | 120.000.000 | 7 Kasus | 130.000.000 | 7 Kasus | 150.000.000 | 7 Kasus | 160.000.000 |
| | | | Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota | Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota | 100% | 100% | 45.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 55.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 80.000.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Jumlah pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kajian analisis dampak lalu lintas | 12 Unit | 12 Unit | 45.000.000 | 13 Unit | 50.000.000 | 15 Unit | 55.000.000 | 17 Unit | 60.000.000 | 19 Unit | 75.000.000 | 20 Unit | 80.000.000 |
| | | | Program Pengelolaan Perkeretaapian | Kinerja layanan perkeretaapian | 100% | 100% | 72.000.000 | 100% | 73.720.000 | 100% | 84.700.000 | 100% | 93.320.000 | 100% | 101.050.000 | 100% | 105.710.000 |
| | | | Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 100% | 72.000.000 | 100% | 73.720.000 | 100% | 84.700.000 | 100% | 93.320.000 | 100% | 101.050.000 | 100% | 105.710.000 |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Penyeberangan Kereta yang dilakukan pemeliharaan | 7 Titik | 7 Titik | 72.000.000 | 7 Titik | 73.720.000 | 7 Titik | 84.700.000 | 7 Titik | 93.320.000 | 7 Titik | 101.050.000 | 7 Titik | 105.710.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|--|--|-------------------------------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | | | Tahun n-1 | | Tahun n-2 | | Tahun n-3 | | Tahun n-4 | | Tahun n-5 | | Tahun n-6 | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik | | | Nilai Sakip | 61 | 63 | 7.559.537.400 | 66 | 8.399.486.000 | 70 | 9.239.434.600 | 75 | 10.163.378.060 | 77 | 11.179.715.866 | 79 | 12.297.687.453 |
| | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 7.559.537.400 | 100% | 8.399.486.000 | 100% | 9.239.434.600 | 100% | 10.163.378.060 | 100% | 11.179.715.866 | 100% | 12.297.687.453 |
| | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 58.500.000 | 100% | 65.000.000 | 100% | 71.500.000 | 100% | 78.650.000 | 100% | 86.515.000 | 100% | 95.166.500 |
| | | | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 54.000.000 | 6 Dokumen | 60.000.000 | 6 Dokumen | 66.000.000 | 6 Dokumen | 72.600.000 | 6 Dokumen | 79.860.000 | 6 Dokumen | 87.846.000 |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.500.000 | 5 Dokumen | 5.000.000 | 5 Dokumen | 5.500.000 | 5 Dokumen | 6.050.000 | 5 Dokumen | 6.655.000 | 5 Dokumen | 7.320.500 |
| | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 5.023.755.000 | 100% | 5.581.950.000 | 100% | 6.140.145.000 | 100% | 6.754.159.500 | 100% | 7.429.575.450 | 100% | 8.172.532.995 |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan | 40 Pegawai | 45 Pegawai | 4.680.000.000 | 50 Pegawai | 5.200.000.000 | 55 Pegawai | 5.720.000.000 | 57 Pegawai | 6.292.000.000 | 60 Pegawai | 6.921.200.000 | 65 Pegawai | 7.613.320.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---|---|-------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | Tahun n-1 | | Tahun n-2 | | Tahun n-3 | | Tahun n-4 | | Tahun n-5 | | Tahun n-6 | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas | 20 Pegawai | 20 Pegawai | 339.255.000 | 20 Pegawai | 376.950.000 | 20 Pegawai | 414.645.000 | 20 Pegawai | 456.109.500 | 20 Pegawai | 501.720.450 | 20 Pegawai | 551.892.495 |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.500.000 | 1 Laporan | 5.000.000 | 1 Laporan | 5.500.000 | 1 Laporan | 6.050.000 | 1 Laporan | 6.655.000 | 1 Laporan | 7.320.500 |
| | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 396.000.000 | 100% | 440.000.000 | 100% | 484.000.000 | 100% | 532.400.000 | 100% | 585.640.000 | 100% | 644.204.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan | 168 Stel | 173 Stel | 171.000.000 | 177 Stel | 190.000.000 | 180 Stel | 209.000.000 | 183 Stel | 229.900.000 | 185 Stel | 252.890.000 | 188 Stel | 278.179.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 145 Pegawai | 150 Pegawai | 225.000.000 | 155 Pegawai | 250.000.000 | 157 Pegawai | 275.000.000 | 160 Pegawai | 302.500.000 | 165 Pegawai | 332.750.000 | 167 Pegawai | 366.025.000 |
| | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 481.950.000 | 100% | 535.500.000 | 100% | 589.050.000 | 100% | 647.955.000 | 100% | 712.750.500 | 100% | 784.025.550 |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik yang disediakan | 20 Buah | 20 Buah | 18.000.000 | 20 Buah | 20.000.000 | 20 Buah | 22.000.000 | 20 Buah | 24.200.000 | 20 Buah | 26.620.000 | 20 Buah | 29.282.000 |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan | 4 Buah | 4 Buah | 40.500.000 | 5 Buah | 45.000.000 | 6 Buah | 49.500.000 | 7 Buah | 54.450.000 | 8 Buah | 59.895.000 | 9 Buah | 65.884.500 |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan | 20 Buah | 20 Buah | 36.000.000 | 20 Buah | 40.000.000 | 20 Buah | 44.000.000 | 20 Buah | 48.400.000 | 20 Buah | 53.240.000 | 20 Buah | 58.564.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|--|---|-------------------------------------|---|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | Tahun n-1 | | Tahun n-2 | | Tahun n-3 | | Tahun n-4 | | Tahun n-5 | | Tahun n-6 | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah logistik kantor yang disediakan | 76 Jenis | 76 Jenis | 202.500.000 | 76 Jenis | 225.000.000 | 76 Jenis | 247.500.000 | 76 Jenis | 272.250.000 | 76 Jenis | 299.475.000 | 76 Jenis | 329.422.500 |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 1500 Lembar | 1500 Lembar | 72.000.000 | 1500 Lembar | 80.000.000 | 1500 Lembar | 88.000.000 | 1500 Lembar | 96.800.000 | 1500 Lembar | 106.480.000 | 1500 Lembar | 117.128.000 |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan | 90 Buah | 90 Buah | 4.950.000 | 90 Buah | 5.500.000 | 90 Buah | 6.050.000 | 90 Buah | 6.655.000 | 90 Buah | 7.320.500 | 90 Buah | 8.052.550 |
| | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Kali | 27 Kali | 108.000.000 | 30 Kali | 120.000.000 | 32 Kali | 132.000.000 | 32 Kali | 145.200.000 | 34 Kali | 159.720.000 | 35 Kali | 175.692.000 |
| | | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 344.700.000 | 100% | 383.000.000 | 100% | 421.300.000 | 100% | 463.430.000 | 100% | 509.773.000 | 100% | 560.750.300 |
| | | | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan | 3 Unit | 3 Unit | 333.900.000 | 5 Unit | 371.000.000 | 5 Unit | 408.100.000 | 5 Unit | 448.910.000 | 3 Unit | 493.801.000 | 2 Unit | 543.181.100 |
| | | | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan | 10 Unit | 10 Unit | 10.800.000 | 13 Unit | 12.000.000 | 15 Unit | 13.200.000 | 17 Unit | 14.520.000 | 18 Unit | 15.972.000 | 20 Unit | 17.569.200 |
| | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 929.057.400 | 100% | 1.032.286.000 | 100% | 1.135.514.600 | 100% | 1.249.066.060 | 100% | 1.373.972.666 | 100% | 1.511.369.933 |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar | 3000 Surat | 3000 Surat | 5.400.000 | 3010 Surat | 6.000.000 | 3020 Surat | 6.600.000 | 3030 Surat | 7.260.000 | 3040 Surat | 7.986.000 | 3050 Surat | 8.784.600 |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan | 3 Rekening | 3 Rekening | 306.000.000 | 3 Rekening | 340.000.000 | 3 Rekening | 374.000.000 | 3 Rekening | 411.400.000 | 3 Rekening | 452.540.000 | 3 Rekening | 497.794.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---|---|-------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | Tahun n-1 | | Tahun n-2 | | Tahun n-3 | | Tahun n-4 | | Tahun n-5 | | Tahun n-6 | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa | 4 Unit | 4 Unit | 4.500.000 | 5 Unit | 5.000.000 | 6 Unit | 5.500.000 | 7 Unit | 6.050.000 | 8 Unit | 6.655.000 | 10 Unit | 7.320.500 |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan | 12 Orang | 12 Orang | 613.157.400 | 12 Orang | 681.286.000 | 12 Orang | 749.414.600 | 12 Orang | 824.356.060 | 12 Orang | 906.791.666 | 12 Orang | 997.470.833 |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 325.575.000 | 100% | 361.750.000 | 100% | 397.925.000 | 100% | 437.717.500 | 100% | 481.489.250 | 100% | 529.638.175 |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi | 31 Unit | 31 Unit | 180.000.000 | 33 Unit | 200.000.000 | 33 Unit | 220.000.000 | 35 Unit | 242.000.000 | 35 Unit | 266.200.000 | 37 Unit | 292.820.000 |
| | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 4 Unit | 4 Unit | 123.075.000 | 4 Unit | 136.750.000 | 4 Unit | 150.425.000 | 4 Unit | 165.467.500 | 4 Unit | 182.014.250 | 4 Unit | 200.215.675 |
| | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 15 Unit | 15 Unit | 22.500.000 | 16 Unit | 25.000.000 | 17 Unit | 27.500.000 | 18 Unit | 30.250.000 | 19 Unit | 33.275.000 | 20 Unit | 36.602.500 |

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir Kinerja | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--|--|--------------|--|---|--------|--------|----------|-------|----------|---|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | A (Juta) | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Terwujudnya kualitas pelayanan transportasi daerah yang baik | | | | | | | 37.340 | | 43.612 | | | | 51.926 | | 57.252 | | 64.433 | | 70.701 | | 325.264 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan | Rasio | 0.310 | 31.043 | 0.305 | 36.122 | Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan | Rasio | 0.195 | 43.241 | 0.190 | 47.149 | 0.185 | 51.851 | 0.180 | 57.011 | 0.180 | 266.417 | BIDANG OPSDAL |
| | Meningkatnya kinerja sarana transportasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Prosentase angka kecelakaan sarana transportasi | Persen | 2.00 | 2.200 | 1.50 | 2.871 | Prosentase angka kecelakaan sarana transportasi | Persen | 0.90 | 3.732 | 0.85 | 3.080 | 0.75 | 3.380 | 0.50 | 3.700 | 0.50 | 18.963 | BIDANG OPSDAL |
| | | 2.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | | 2.185 | | 2.856 | | | | 3.732 | | 3.080 | | 3.380 | | 3.700 | | 18.933 | BIDANG OPSDAL |
| | | | | Prosentase kendaraan bermotor wajib uji | persen | 70.30 | 784 | 70.60 | 814 | Prosentase kendaraan bermotor wajib uji | persen | 70.90 | 2.331 | 71.20 | 957 | 71.50 | 1.052 | 71.80 | 1.159 | 71.80 | 7.097 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.05 | Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | Persen | | 784 | | 814 | | | | 2.331 | | 957 | | 1.052 | | 1.159 | | 7.097 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | persen | 100 | | 100 | | Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|---|--------|--------|----------|------|----------|--|---------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|-------|---------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 2.15.02.2.05.0005 | Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 10 | | 49 | | | | 33 | | 33 | | 36 | | 40 | | 201 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah pemilik bengkel umum dan karoseri serta para pemilik kendaraan tidak bermotor yang mengikuti sosialisasi | orang | 45 | | 50 | | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | laporan | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 6 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.05.0007 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 744 | | 728 | | | | 2.254 | | 880 | | 968 | | 1.065 | | 6.639 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah alat uji yang lulus uji kalibrasi | Unit | 9 | | 9 | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | Unit | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.05.0008 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 15 | | 17 | | | | 22 | | 22 | | 24 | | 27 | | 127 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|---|--|--------|--------|----------|-------|----------|---|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | Jumlah pemilik kendaraan wajib uji yang mengikuti sosialisasi | Orang | 45 | | 50 | | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | laporan | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 6 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.05 .0010 | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 15 | | 20 | | | | 22 | | 22 | | 24 | | 27 | | 130 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah kendaraan angkutan di terminal-terminal dan garasi PO Bus yang melaksanakan uji petik | Unit | 95 | | 100 | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | laporan | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 6 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | | 1.401 | | 2.042 | | | | 1.401 | | 2.123 | | 2.328 | | 2.541 | | 11.836 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum | Persen | 10.27 | 1.401 | 10.27 | 2.042 | Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum | Persen | 10.27 | 1.401 | 11.00 | 2.123 | 11.49 | 2.328 | 11.98 | 2.541 | 11.98 | 11.832 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.08 | Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | 973 | | 863 | | | | 894 | | 1.659 | | 1.825 | | 2.007 | | 8.221 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah | |
|--------|---------|-----------------------|---|--|--------|--------|----------|------|----------|---|---------|--------|----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------|----------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | | Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ | Persen | 100 | | 100 | | Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.08 .0004 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | | 15 | | 15 | | | | 22 | | 712 | | 783 | | 861 | | 2.408 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah sopir/jurumudi yang mengikuti sosialisasi | Orang | 25 | | 30 | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | laporan | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 48 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB | |
| | | 2.15.02.2.08 .0007 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 30 | | 15 | | | | 22 | | 0 | | 0 | | 0 | | 67 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|---|---|--------|--------|----------|------|----------|---|---------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|---------------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | Jumlah Pengelola Angkutan Umum yang mengikuti sosialisasi | Orang | 25 | | 30 | | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.08 .0009 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 928 | | 833 | | | | 850 | | 947 | | 1.042 | | 1.146 | | 5.746 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah operasi pelaksanaan penertiban angkutan umum yang dilaksanakan | Kali | 115 | | 120 | | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | laporan | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 48 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|---|---|--------|--------|----------|------|----------|--|---------|--------|----|------|----|------|----|------|----|---------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 2.15.02.2.11 | Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 244 | | 419 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 663 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Prosentase Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persen | 100 | | 100 | | Prosentase Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 100 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.11.0003 | Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 244 | | 419 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 663 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah pengamanan harian dan insidental yang diselenggarakan | Kali | 185 | | 187 | | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | dokumen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|--|--|--------|--------|----------|------|----------|--|--------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 2.15.02.2.09 | Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 180 | | 583 | | | | 419 | | 228 | | 243 | | 249 | | 1.902 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | persen | 100 | | 100 | | Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.09 .0002 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 30 | | 34 | | | | 33 | | 77 | | 85 | | 93 | | 352 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|---|--|----------|--------|----------|------|----------|---|---------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | Jumlah database pelayanan angkutan yang terupdate | database | 1 | | 1 | | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | laporan | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 19 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.09 .0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 150 | | 549 | | | | 386 | | 151 | | 158 | | 156 | | 1.550 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah kajian manajemen pengelolaan angkutan yang diadakan | dokumen | 1 | | 1 | | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | unit | 33 | | 33 | | 33 | | 33 | | 33 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|----------------|--------|----------|------|----------|--|----------------|--------|----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 2.15.02.2.12 | Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 125 | | | | 36 | | 134 | | 148 | | 162 | | 605 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>persen</i> | 0 | | 100 | | Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>persen</i> | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.12.0001 | Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota | | | | 0 | | 105 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 105 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah Dokumen RUJT dan SK Bupati tentang RUJT yang diadakan | <i>dokumen</i> | 0 | | 1 | | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>dokumen</i> | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir Kinerja | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|--------|--------|----------|------|----------|---|---------|--------|----|------|-----|------|-----|------|-----|-----------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | A (Juta) | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 2.15.02.2.12.0002 | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 20 | | | | 36 | | 134 | | 148 | | 162 | | 500 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan uji coba implementasi RUJT | orang | 0 | | 60 | | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | dokumen | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 22 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.14 | Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4 | | 52 | | | | 52 | | 102 | | 112 | | 123 | | 441 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah | | |
|--------|---------|-----------------------|--|---|--------|--------|----------|------|----------|---|--------|--------|----|------|----|------|----|------|----|---------------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | | Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persen | 100 | | 100 | | Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.14 .0002 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 4 | | 32 | | | | 30 | | 30 | | 33 | | 36 | | 161 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir Kinerja | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|--------|--------|----------|------|----------|--|---------|--------|----|------|----|------|----|------|----|-----------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | A (Juta) | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | Jumlah koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan yang dilaksanakan | kali | 6 | | 7 | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | laporan | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 48 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.14.0003 | Sub Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | | | | 0 | | 20 | | | | 22 | | 72 | | 79 | | 87 | | 280 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah perizinan yang terfasilitasi | Izin | 0 | | 25 | | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | laporan | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 19 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|--------------|---|--|--------|--------|----------|------|----------|---|--------|--------|----|------|----|------|----|------|----|---------------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 2.15.03 | Program Pengelolaan Pelayaran | | | | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | | 30 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Persentase Kinerja layanan penyeberangan sungai | persen | 100 | | 100 | | Persentase Kinerja layanan penyeberangan sungai | Persen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.03.2.06 | Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota | | | | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | | 30 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Prosentase Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota | Persen | 100 | | 100 | | Prosentase Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota | Persen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir Kinerja | | Unit Kerja Perangkat Daerah | |
|--------|---|-------------------|--|--|--------|--------|----------|------|----------|---|---------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-----------------------|----------|-----------------------------|--|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | A (Juta) | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | 2.15.03.2.06.0004 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | | 30 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB | |
| | | | | Jumlah perahu yang dilakukan pemeliharaan | unit | 1 | | 1 | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | laporan | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB | |
| | Meningkatnya kinerja prasarana transportasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Prosentase angka kecelakaan prasarana transportasi | Persen | 26.50 | 28.843 | 26 | 33.251 | Prosentase angka kecelakaan prasarana transportasi | Persen | 19 | 39.509 | 18.5 | 44.069 | 18 | 48.471 | 17.5 | 53.311 | 17.5 | 247.454 | BIDANG OPSDAL BIDANG LL | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|---|---|---------|--------|----------|------|----------|--|---------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|---------------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 2.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | | 28.768 | | 32.976 | | | | 38.658 | | 42.837 | | 47.116 | | 51.820 | | 242.175 | BIDANG LL |
| | | | | Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan | Persen | 81 | | 82 | | Prosentase prasarana lalu lintas angkutan jalan | Persen | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | 86 | | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.01 | Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | 134 | | 737 | | | | 715 | | 275 | | 303 | | 333 | | 2.497 | BIDANG LL |
| | | | | Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Persen | 100 | | 100 | | Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.01 .0001 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | 50 | | 200 | | | | 330 | | 275 | | 303 | | 333 | | 1.491 | BIDANG LL |
| | | | | Jumlah kajian manajemen lalu lintas yang diadakan | dokumen | 3 | | 4 | | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | dokumen | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 16 | | BIDANG LL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir Kinerja | | Unit Kerja Perangkat Daerah | |
|--------|---------|-------------------|---|---|--------|--------|----------|------|----------|---|---------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-----------------------|----------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | A (Juta) | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | 2.15.02.2.01.0002 | Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | 84 | | 536 | | | | 330 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 950 | BIDANG OPSDAL |
| | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi keselamatan lalu lintas | orang | 4000 | | 4250 | | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | dokumen | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | BIDANG OPSDAL | |
| | | 2.15.02.2.01.0007 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 1 | | | | 55 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 56 | BIDANG OPSDAL |
| | | | | Jumlah koordinasi wahana tata ngraha yang dilaksanakan | kali | 0 | | 7 | | Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | laporan | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | BIDANG OPSDAL | |
| | | 2.15.02.2.02 | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | 27.651 | | 30.824 | | | | 36.398 | | 40.487 | | 44.536 | | 48.988 | | | 228.884 | BIDANG LL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah | |
|--------|---------|-------------------|---|---|--------|--------|----------|------|----------|--|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|---------------|----------|--------------------------------|-----------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | | Prosentase Kualitas Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Persen | 100 | | 100 | | Prosentase Kualitas Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.02.0001 | Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | 50 | | 150 | | | | 110 | | 220 | | 242 | | 266 | | 1.038 | | BIDANG LL |
| | | | | Jumlah pagar pengaman jalan yang diadakan | meter | 70 | | 72 | | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | unit | 25 | | 50 | | 60 | | 65 | | 200 | | | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.02.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | 26.953 | | 29.873 | | | | 35.529 | | 39.145 | | 43.060 | | 47.365 | | 221.925 | | BIDANG LL |
| | | | | Jumlah titik pju yang dilakukan pemeliharaan | titik | 3000 | | 3200 | | Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | unit | 3300 | | 3412 | | 3489 | | 3576 | | 3576 | | | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.02.0003 | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | | 491 | | 651 | | | | 594 | | 682 | | 750 | | 825 | | 3.993 | | BIDANG LL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|---------------|--------|----------|------|----------|---|--------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | Jumlah rambu keselamatan jalan yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1250 | | 1275 | | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | unit | 1285 | | 1411 | | 1537 | | 1660 | | 1660 | | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.02.0004 | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | 157 | | 150 | | | | 165 | | 440 | | 484 | | 532 | | 1.928 | BIDANG LL |
| | | | | Luas marka jalan dan zona aman selamat sekolah yang diadakan | Meter Persegi | 5240 | | 5320 | | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 7291 | | 7829 | | 8650 | | 9220 | | 9220 | | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.03 | Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | | 262 | | 336 | | | | 400 | | 710 | | 776 | | 848 | | 3.332 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persen | 100 | | 100 | | Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.03.0009 | Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 220 | | 242 | | 266 | | 728 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah Terminal/ Shelter/ Halte yang dibangun | Unit | 0 | | 0 | | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | Unit | 0 | | 6 | | 6 | | 6 | | 18 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|---|---|--------|--------|----------|------|----------|--|--------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 2.15.02.2.03.0011 | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 262 | | 336 | | | | 400 | | 490 | | 534 | | 582 | | 2.604 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah terminal tipe c yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | | 4 | | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | Unit | 4 | | 34 | | 40 | | 46 | | 46 | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.04 | Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | 73 | | 513 | | | | 600 | | 600 | | 660 | | 726 | | 3.172 | BIDANG LL |
| | | | | Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persen | 100 | | 100 | | Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.04.0002 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 72 | | 513 | | | | 600 | | 600 | | 660 | | 726 | | 3.171 | BIDANG LL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|--------------|---|--|--------|--------|----------|------|----------|--|---------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | Jumlah petugas parkir yang mengikuti sosialisasi | orang | 850 | | 875 | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | laporan | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 8 | | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.06 | Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 598 | | 516 | | | | 490 | | 671 | | 738 | | 812 | | 3.825 | BIDANG LL |
| | | | | Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persen | 100 | | 100 | | Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BIDANG LL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|--------|--------|----------|------|----------|--|---------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 2.15.02.2.06.0015 | Sub Kegiatan Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 90 | | 97 | | | | 55 | | 121 | | 133 | | 146 | | 642 | BIDANG LL |
| | | | | Jumlah kasus lalu lintas yang diselesaikan dalam koordinasi lalu lintas antar stakeholder bidang perhubungan | Kasus | 6 | | 6 | | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | laporan | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 24 | | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.06.0016 | Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 508 | | 419 | | | | 435 | | 550 | | 605 | | 666 | | 3.183 | BIDANG LL |
| | | | | Jumlah Rambu Keselamatan Jalan dan ATCS yang diadakan | Unit | 118 | | 121 | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | dokumen | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 8 | | BIDANG LL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah | |
|--------|---------|-------------------|---|--|--------|--------|----------|------|----------|--|---------|--------|-----|------|-------|------|-------|------|-------|---------------|----------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | 2.15.02.2.07 | Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | 50 | | 50 | | | | 55 | | 94 | | 103 | | 113 | | 465 | BIDANG LL | |
| | | | | Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persen | 100 | | 100 | | Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 465 | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.07.0006 | Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | | | | 50 | | 50 | | | | 55 | | 94 | | 103 | | 113 | | 465 | BIDANG LL | |
| | | | | Jumlah pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kajian analisis dampak lalu lintas | Unit | 12 | | 13 | | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi | laporan | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 46 | | | BIDANG LL |
| | | 2.15.05 | Program Pengelolaan Perkeretaapian | | | | 75 | | 275 | | | | 851 | | 1.232 | | 1.355 | | 1.491 | | 5.279 | BIDANG OPSDAL | |
| | | | | Prosentase Kinerja layanan perkeretaapian | Persen | 100 | | 100 | | Prosentase Kinerja layanan perkeretaapian | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | BIDANG OPSDAL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|--------------|--|--|--------|--------|----------|------|----------|---|--------|--------|-----|------|-------|------|-------|------|-------|---------------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 2.15.05.2.07 | Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapihan Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 75 | | 275 | | | | 851 | | 1.232 | | 1.355 | | 1.491 | | 5.279 | BIDANG OPSDAL |
| | | | | Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapihan Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persen | 100 | | 100 | | Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapihan Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BIDANG OPSDAL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|---|---|--------|--------|----------|------|----------|---|---------|--------|-----|------|-------|------|-------|------|-------|---------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 2.15.05.2.07.0002 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 75 | | 275 | | | | 851 | | 1.232 | | 1.355 | | 1.491 | | 5.279 | BIDANG OPSDAL |
| | | | | Jumlah Fasilitas Penyeberangan Kereta yang dilakukan pemeliharaan | titik | 7 | | 7 | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | laporan | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 28 | | BIDANG OPSDAL |

| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir Kinerja | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|-----------------------|---|--|--------|--------|----------|------|----------|--|--------|--------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|-----------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | A (Juta) | |
| | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | Nilai Sakip | Angka | 63 | 6.297 | 66 | 7.490 | Nilai Sakip | Angka | 70 | 8.685 | 75 | 10.103 | 77 | 12.582 | 79 | 13.690 | 79 | 58.846 | SEKRETARIAT |
| 2.15.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 6.297 | | 7.490 | | | | 8.685 | | 10.103 | | 12.582 | | 13.690 | | 58.846 | SEKRETARIAT |
| | | Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | | 100 | | Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | SEKRETARIAT |
| 2.15.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 65 | | 162 | | | | 88 | | 88 | | 97 | | 106 | | 606 | SEKRETARIAT |
| | | Cakupan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100 | | 100 | | Cakupan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | SEKRETARIAT |
| 2.15.01.2.01.00 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 60 | | 109 | | | | 55 | | 55 | | 61 | | 67 | | 407 | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|---------|--------|----------|------|----------|--|---------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|---------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | dokumen | 6 | | 6 | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 36 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.01.0006 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 5 | | 53 | | | | 33 | | 33 | | 36 | | 40 | | 200 | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | dokumen | 5 | | 5 | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 30 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 4.293 | | 5.089 | | | | 6.228 | | 6.474 | | 7.122 | | 7.834 | | 37.040 | SEKRETARIAT |
| | | | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persen | 100 | | 100 | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|---|---|--|--------|----------|------|----------|---|-------------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|---------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 2.15.01.2.02.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 3.911 | | 4.712 | | | | 5.841 | | 6.087 | | 6.696 | | 7.366 | | 34.613 | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan | Pegawai | 45 | | 50 | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 51 | | 56 | | 57 | | 58 | | 58 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.02.0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 377 | | 324 | | | | 365 | | 365 | | 402 | | 442 | | 2.275 | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas | Jumlah dokumen administrasi SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan | 14 | | 14 | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | dokumen | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 84 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.02.0005 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 5 | | 53 | | | | 22 | | 22 | | 24 | | 27 | | 153 | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|---------|--------|----------|------|----------|--|---------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun | dokumen | 1 | | 1 | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | dokumen | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 157 | | 158 | | | | 202 | | 542 | | 597 | | 656 | | 2.312 | SEKRETARIAT |
| | | | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persen | 100 | | 100 | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.05.0002 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 157 | | 158 | | | | 160 | | 176 | | 194 | | 213 | | 1.058 | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan | Stel | 173 | | 177 | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 156 | | 159 | | 163 | | 164 | | 992 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.05.0009 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 0 | | 0 | | | | 42 | | 366 | | 403 | | 443 | | 1.254 | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|---|---|---------|--------|----------|------|----------|---|--------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pegawai | 0 | | 0 | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 104 | | 125 | | 129 | | 130 | | 488 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 456 | | 637 | | | | 642 | | 760 | | 827 | | 909 | | 4.231 | SEKRETARIAT |
| | | | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persen | 100 | | 100 | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.06.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik yang disediakan | | | 20 | | 20 | | | | 44 | | 44 | | 48 | | 53 | | 229 | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah komponen listrik yang disediakan | Buah | 20 | | 20 | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 120 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.06.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 99 | | 91 | | | | 63 | | 110 | | 121 | | 133 | | 617 | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah | |
|--------|---------|-------------------|--|---|--------|--------|----------|------|----------|--|--------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------|----------|--------------------------------|-------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan | unit | 4 | | 5 | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 8 | | 12 | | 12 | | 12 | | 53 | | SEKRETARIAT | |
| | | 2.15.01.2.06.0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 30 | | 40 | | | | 44 | | 44 | | 48 | | 53 | | 259 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan | buah | 20 | | 20 | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 20 | | 30 | | 30 | | 30 | | 150 | | SEKRETARIAT | |
| | | 2.15.01.2.06.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 210 | | 265 | | | | 292 | | 292 | | 321 | | 353 | | 1.733 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Jumlah logistik kantor yang disediakan | Jenis | 76 | | 76 | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 76 | | 76 | | 76 | | 76 | | 456 | | SEKRETARIAT | |
| | | 2.15.01.2.06.0005 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 50 | | 80 | | | | 88 | | 88 | | 88 | | 97 | | 491 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | Lembar | 1500 | | 1500 | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 8 | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir Kinerja | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|--|--|--------|--------|----------|------|----------|---|--------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | K | A (Juta) | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | | 100 | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.07.00 01 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 1.424 | | 1.424 | | 2.848 | SEKRETARIAT |
| | | | | | Unit | 0 | | 0 | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | | 0 | | 6 | | 6 | | 12 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.07.00 05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | | | | 19 | | 12 | | | | 18 | | 66 | | 73 | | 80 | | 268 | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah Mebel yang diadakan | Unit | 10 | | 13 | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 16 | | 30 | | 30 | | 30 | | 129 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 990 | | 990 | | | | 1.101 | | 1.403 | | 1.544 | | 1.698 | | 7.726 | SEKRETARIAT |
| | | | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 | | 100 | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|----------|--------|----------|------|----------|--|---------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|---------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 2.15.01.2.08.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6 | | 6 | | | | 11 | | 11 | | 12 | | 13 | | 59 | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah surat keluar dan masuk yang dikelola | Surat | 3000 | | 3010 | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 48 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.08.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 319 | | 260 | | | | 298 | | 388 | | 427 | | 469 | | 2.161 | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan | rekening | 3 | | 3 | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 48 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.08.0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 40 | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara | Unit | 4 | | 5 | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | laporan | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 24 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.08.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 660 | | 719 | | | | 787 | | 997 | | 1.097 | | 1.207 | | 5.467 | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|---|--------|--------|----------|------|----------|---|---------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan | orang | 12 | | 12 | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 48 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 317 | | 442 | | | | 407 | | 770 | | 898 | | 982 | | 3.816 | SEKRETARIAT |
| | | | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 | | 100 | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.09.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 187 | | 191 | | | | 220 | | 275 | | 353 | | 383 | | 1.609 | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|---|---|--------|--------|----------|------|----------|--|--------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kinerja | | |
| | | | | | | K | A (Juta) | K | A (Juta) | | | K | A | K | A | K | A | K | A | K | A (Juta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi | unit | 31 | | 33 | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 33 | | 32 | | 38 | | 42 | | 42 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.09.0009 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 110 | | 213 | | | | 165 | | 440 | | 484 | | 532 | | 1.944 | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | | 4 | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.09.0010 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20 | | 38 | | | | 22 | | 55 | | 61 | | 67 | | 263 | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 15 | | 16 | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 17 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | SEKRETARIAT |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merujuk pada indikator kinerja tujuan/sasaran yang telah tercantum dalam bab IV serta indikator program dalam bab VI.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yaitu rasio angka fatalitas kecelakaan di sektor perhubungan, persentase angka kecelakaan sarana transportasi, dan persentase angka kecelakaan prasarana transportasi.

Secara lengkap Indikator Kinerja Utama, kondisi awal kinerja (Tahun 2020) dan target capaian kinerja (Tahun 2021-2026) terangkum dalam **tabel 7.1**, **tabel 7.3** dan **tabel 7.5** untuk Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sedangkan untuk Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo ada pada **tabel 7.2**, **tabel 7.4** dan **tabel 7.6** berikut :

Tabel 7.1

**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo**

| No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|-----|--|--------------|----------------|-------|--------|-------|--------|-----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan | 0,270 | 0,310 | 0,305 | 0,300 | 0,296 | 0,292 | 0,290 |
| 2 | Persentase angka kecelakaan sarana transportasi | 0,25% | 2% | 1,5% | 1,25% | 1% | 0,75% | 0,50% |
| 3 | Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi | 23,50% | 26,50% | 26% | 25,50% | 25% | 24,50% | 24% |

Tabel 7.2

**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026
Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo**

| No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|-----|--|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan | 0,270 | 0,310 | 0,305 | 0,195 | 0,190 | 0,185 | 0,180 |
| 1.1 | Persentase angka kecelakaan sarana transportasi | 0,25% | 2% | 1,50% | 0,90% | 0,85% | 0,75% | 0,50% |
| 1.2 | Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi | 23,50% | 26,50% | 26% | 19% | 18,5% | 18% | 17,5% |
| 1.3 | Nilai SAKIP | 61 | 63 | 66 | 70 | 75 | 77 | 79 |

Tabel 7.3

**Indikator Kinerja Program yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo**

| No | Indikator Program | Kondisi Awal RPJMD | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir Kinerja RPJMD |
|-----|--|--------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Prosentase kendaraan bermotor wajibuji | 70% | 70,30% | 70,60% | 70,90% | 71,20% | 71,50% | 71,80% |
| 2 | Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum | 10,27% | 10,27% | 10,27% | 10,27% | 11% | 11,49% | 11,98% |
| 3 | Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% |

Tabel 7.4

**Indikator Kinerja Program yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo**

| No | Indikator Program | Kondisi Awal RPJMD | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir Kinerja RPJMD |
|-----|--|--------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Prosentase kendaraan bermotor wajibuji | 70% | 70,30% | 70,60% | 70,90% | 71,20% | 71,50% | 71,80% |
| 2 | Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum | 10,27% | 10,27% | 10,27% | 10,27% | 11% | 11,49% | 11,98% |
| 3 | Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% |

Tabel 7.5

**Indikator Kinerja yang Mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026**

| No | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Prosentase kendaraan bermotor wajib uji | 70% | 70,30% | 70,60% | 70,90% | 71,20% | 71,50% | 71,80% |
| 1.1 | Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.1 | Jumlah pemilik bengkel umum dan karoseri serta para pemilik kendaraan tidak bermotor yang mengikuti sosialisasi | 45 Orang | 45 Orang | 50 Orang | 55 Orang | 60 Orang | 65 Orang | 70 Orang |
| 1.1.2 | Jumlah alat uji yang lulus uji kalibrasi | 9 Unit | 9 Unit | 9 Unit | 9 Unit | 9 Unit | 9 Unit | 9 Unit |
| 1.1.3 | Jumlah pemilik kendaraan wajib uji yang mengikuti sosialisasi | 45 Orang | 45 Orang | 50 Orang | 55 Orang | 60 Orang | 65 Orang | 70 Orang |
| 1.1.4 | Jumlah kendaraan angkutan di terminal-terminal dan garasi PO Bus yang melaksanakan uji petik | 95 Unit | 95 Unit | 100 Unit | 105 Unit | 110 Unit | 115 Unit | 120 Unit |
| 2 | Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum | 10,27% | 10,27% | 10,27% | 10,27% | 11% | 11,49% | 11,98% |
| 2.1 | Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.1 | Jumlah operasi pelaksanaan penertiban angkutan umum yang dilaksanakan | 115 Kali | 115 Kali | 120 Kali | 125 Kali | 130 Kali | 135 Kali | 140 Kali |
| 2.1.2 | Jumlah sopir/jurumudi yang mengikuti sosialisasi | 25 Orang | 25 Orang | 30 Orang | 35 Orang | 40 Orang | 45 Orang | 50 Orang |
| 2.1.3 | Jumlah Pengelola Angkutan Umum yang mengikuti sosialisasi | 25 Orang | 25 Orang | 30 Orang | 35 Orang | 40 Orang | 45 Orang | 50 Orang |

| No | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|------------|--|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2.2 | Prosentase Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.2.1 | Jumlah pengamanan harian dan insidentil yang diselenggarakan | 185 Kali | 185 Kali | 187 Kali | 189 Kali | 192 Kali | 195 Kali | 197 Kali |
| 2.3 | Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.3.1 | Jumlah kajian manajemen pengelolaan angkutan yang diadakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 2.3.2 | Jumlah database pelayanan angkutan yang terupdate | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database |
| 2.4 | Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.4.1 | Jumlah Dokumen RUJT dan SK Bupati tentang RUJT yang diadakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 2.4.2 | Jumlah Sosialisasi dan Uji coba implementasi RUJT yang dilaksanakan | 8 Kali | 8 Kali | 10 Kali | 12 Kali | 15 Kali | 17 Kali | 20 Kali |
| 2.5 | Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.5.1 | Jumlah perizinan yang terfasilitasi | 25 Izin | 25 Izin | 27 Izin | 30 Izin | 32 Izin | 34 Izin | 35 Izin |
| 2.5.2 | Jumlah koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan yang dilaksanakan | 6 Kali | 6 Kali | 7 Kali | 8 Kali | 9 Kali | 10 Kali | 12 Kali |

| No | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|------------|---|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 3 | Kinerja layanan penyeberangan sungai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.1 | Prosentase Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.1.1 | Jumlah perahu yang dilakukan pemeliharaan | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit |
| 4 | Prosentase prasarana lalu lintas angkutan jalan | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% |
| 4.1 | Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.1.1 | Jumlah kajian manajemen lalu lintas yang diadakan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen |
| 4.1.2 | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi keselamatan lalu lintas | 4000 Orang | 4000Orang | 4250 Orang | 6000 Orang | 6500 Orang | 7000 Orang | 8500 Orang |
| 4.1.3 | Jumlah koordinasi wahana tata nugraha yang dilaksanakan | 6 Kali | 6 Kali | 7 Kali | 8 Kali | 9 Kali | 10 Kali | 11 Kali |
| 4.2 | Prosentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.2.1 | Jumlah pagar pengaman jalan yang diadakan | 70 Meter | 70 Meter | 72 Meter | 80 Meter | 88 Meter | 100 Meter | 120 Meter |
| 4.2.2 | Jumlah titik pju yang dilakukan pemeliharaan | 3000 Titik | 3000 Titik | 3200 Titik | 3500 Titik | 4000 Titik | 4500 Titik | 5000 Titik |

| No | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 4.2.3 | Jumlah rambu keselamatan jalan yang dilakukan pemeliharaan | 1250 Unit | 1250 Unit | 1275 Unit | 1285 Unit | 1295 Unit | 1305 Unit | 1310 Unit |
| 4.2.4 | Luas marka jalan dan zona aman selamat sekolah yang diadakan | 5240 m ² | 5240 m ² | 5320 m ² | 7400 m ² | 7550 m ² | 8150 m ² | 5350 m ² |
| 4.3 | Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.3.1 | Jumlah Terminal/ Shelter/ Halte yang dibangun | 0 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 4 Unit | 4 Unit |
| 4.3.2 | Jumlah terminal tipe c yang dilakukan pemeliharaan | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit |
| 4.4 | Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.4.1 | Jumlah petugas parkir yang mengikuti sosialisasi | 850 Orang | 850 Orang | 875 Orang | 900 Orang | 925 Orang | 930 Orang | 950 Orang |
| 4.5 | Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.5.1 | Jumlah Rambu Keselamatan Jalan dan ATCS yang diadakan | 118 Unit | 118 Unit | 121 Unit | 123 Unit | 125 Unit | 127 Unit | 130 Unit |
| 4.5.2 | Jumlah kasus lalu lintas yang diselesaikan dalam koordinasi lalu lintas antar stakeholder bidang perhubungan | 6 Kasus | 6 Kasus | 6 Kasus | 6 Kasus | 7 Kasus | 7 Kasus | 7 Kasus |
| 4.6 | Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.6.1 | Jumlah pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kajian analisis dampak lalu lintas | 12 Unit | 12 Unit | 13 Unit | 15 Unit | 17 Unit | 19 Unit | 20 Unit |

| No | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|------------|--|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 5 | Kinerja layanan perkeretaapian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.1 | Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.1.1 | Jumlah Fasilitas Penyeberangan Kereta yang dilakukan pemeliharaan | 7 Titik | 7 Titik | 7 Titik | 7 Titik | 7 Titik | 7 Titik | 7 Titik |
| 6 | Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.1 | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.1.1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen |
| 6.1.2 | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen |
| 6.2 | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.2.1 | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan | 40 Pegawai | 45 Pegawai | 50 Pegawai | 55 Pegawai | 57 Pegawai | 60 Pegawai | 65 Pegawai |
| 6.2.2 | Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas | 20 Pegawai | 20 Pegawai | 20 Pegawai | 20 Pegawai | 20 Pegawai | 20 Pegawai | 20 Pegawai |
| 6.2.3 | Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |

| No | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|------------|---|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 6.3 | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.3.1 | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan | 168 Stel | 173 Stel | 177 Stel | 180 Stel | 183 Stel | 185 Stel | 188 Stel |
| 6.3.2 | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 145 Pegawai | 150 Pegawai | 155 Pegawai | 157 Pegawai | 160 Pegawai | 165 Pegawai | 167 Pegawai |
| 6.4 | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.4.1 | Jumlah komponen listrik yang disediakan | 20 Buah | 20 Buah | 20 Buah | 20 Buah | 20 Buah | 20 Buah | 20 Buah |
| 6.4.2 | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan | 4 Buah | 4 Buah | 5 Buah | 6 Buah | 7 Buah | 8 Buah | 9 Buah |
| 6.4.3 | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan | 20 Buah | 20 Buah | 20 Buah | 20 Buah | 20 Buah | 20 Buah | 20 Buah |
| 6.4.4 | Jumlah logistik kantor yang disediakan | 76 Jenis | 76 Jenis | 76 Jenis | 76 Jenis | 76 Jenis | 76 Jenis | 76 Jenis |
| 6.4.5 | Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 1500 Lembar | 1500 Lembar | 1500 Lembar | 1500 Lembar | 1500 Lembar | 1500 Lembar | 1500 Lembar |
| 6.4.6 | Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan | 90 Buah | 90 Buah | 90 Buah | 90 Buah | 90 Buah | 90 Buah | 90 Buah |
| 6.4.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Kali | 27 Kali | 30 Kali | 32 Kali | 32 Kali | 34 Kali | 35 Kali |
| 6.5 | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.5.1 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan | 3 Unit | 3 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 3 Unit | 2 Unit |
| 6.5.2 | Jumlah Mebel yang diadakan | 10 Unit | 10 Unit | 13 Unit | 15 Unit | 17 Unit | 18 Unit | 20 Unit |

| No | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|------------|---|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 6.6 | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.6.1 | Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar | 3000 Surat | 3000 Surat | 3010 Surat | 3020 Surat | 3030 Surat | 3040 Surat | 3050 Surat |
| 6.6.2 | Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan | 3 Rekening | 3 Rekening | 3 Rekening | 3 Rekening | 3 Rekening | 3 Rekening | 3 Rekening |
| 6.6.3 | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa | 4 Unit | 4 Unit | 5 Unit | 6 Unit | 7 Unit | 8 Unit | 10 Unit |
| 6.6.4 | Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan | 12 Orang | 12 Orang | 12 Orang | 12 Orang | 12 Orang | 12 Orang | 12 Orang |
| 6.7 | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.7.1 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi | 31 Unit | 31 Unit | 33 Unit | 33 Unit | 35 Unit | 35 Unit | 37 Unit |
| 6.7.2 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit |
| 6.7.3 | Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 15 Unit | 15 Unit | 16 Unit | 17 Unit | 18 Unit | 19 Unit | 20 Unit |

Tabel 7.6

**Indikator Kinerja yang Mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|--|---|--------|--------|-------|---|--------|--------|-------|-------|-------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Prosentase kendaraan bermotor wajib uji | persen | 70.30 | 70.60 | Prosentase kendaraan bermotor wajib uji | persen | 70.90 | 71.20 | 71.50 | 71.80 | 71.80 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.05 | Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | Persen | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | persen | 100 | 100 | Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.05 .0005 | Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|---|---|--------------|--------|------|--|----------------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Jumlah pemilik bengkel umum dan karoseri serta para pemilik kendaraan tidak bermotor yang mengikuti sosialisasi | <i>orang</i> | 45 | 50 | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | <i>laporan</i> | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.05.0007 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah alat uji yang lulus uji kalibrasi | <i>Unit</i> | 9 | 9 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | <i>Unit</i> | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.05.0008 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|---|--|--------|--------|-------|---|---------|--------|-------|-------|-------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Jumlah pemilik kendaraan wajib uji yang mengikuti sosialisasi | Orang | 45 | 50 | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | laporan | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.05.0010 | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah kendaraan angkutan di terminal-terminal dan garasi PO Bus yang melaksanakan uji petik | Unit | 95 | 100 | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | laporan | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum | Persen | 10.27 | 10.27 | Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum | Persen | 10.27 | 11.00 | 11.49 | 11.98 | 11.98 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.08 | Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|---|--------|--------|------|--|---------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ | Persen | 100 | 100 | Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.08.0004 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah sopir/jurumudi yang mengikuti sosialisasi | Orang | 25 | 30 | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.08.0007 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|---|---|--------|--------|------|---|---------|--------|------|------|------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Jumlah Pengelola Angkutan Umum yang mengikuti sosialisasi | Orang | 25 | 30 | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.08 .0009 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah operasi pelaksanaan penertiban angkutan umum yang dilaksanakan | Kali | 115 | 120 | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|---|---|---------------|--------|------|--|----------------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.02.2.11 | Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Prosentase Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persen</i> | 100 | 100 | Prosentase Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.11.0003 | Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah pengamanan harian dan insidental yang diselenggarakan | <i>Kali</i> | 185 | 187 | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | <i>dokumen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|--------|--------|------|--|--------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.02.2.09 | Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | persen | 100 | 100 | Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.09.0002 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|---|--|-----------------|--------|------|---|----------------|--------|------|------|------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Jumlah database pelayanan angkutan yang terupdate | <i>database</i> | 1 | 1 | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | <i>laporan</i> | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.09 .0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah kajian manajemen pengelolaan angkutan yang diadakan | <i>dokumen</i> | 1 | 1 | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | <i>unit</i> | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|----------------|--------|------|--|----------------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.02.2.12 | Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>persen</i> | 0 | 100 | Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>persen</i> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.12.0001 | Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah Dokumen RUJT dan SK Bupati tentang RUJT yang diadakan | <i>dokumen</i> | 0 | 1 | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>dokumen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|---|--|--------------|--------|------|--|----------------|--------|------|------|------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.02.2.12 .0002 | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan uji coba implementasi RUJT | <i>orang</i> | 0 | 60 | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota | <i>dokumen</i> | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.14 | Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|---|--|--------|--------|------|---|--------|--------|------|------|------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persen | 100 | 100 | Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.14 .0002 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|--------------------|--|--|--------|--------|------|--|---------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Jumlah koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan yang dilaksanakan | kali | 6 | 7 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.14 .0003 | Sub Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah perizinan yang terfasilitasi | Izin | 0 | 25 | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | laporan | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|--------------|--|--|--------|--------|------|---|--------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.03 | Program Pengelolaan Pelayaran | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Persentase Kinerja layanan penyeberangan sungai | persen | 100 | 100 | Persentase Kinerja layanan penyeberangan sungai | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.03.2.06 | Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Prosentase Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persen | 100 | 100 | Prosentase Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|---|--------|--------|------|---|---------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.03.2.06.0004 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah perahu yang dilakukan pemeliharaan | unit | 1 | 1 | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|---------|--------|------|--|---------|--------|------|------|------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan | Persen | 81 | 82 | Prosentase prasarana lalu lintas angkutan jalan | Persen | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.01 | Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |
| | | | | Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Persen | 100 | 100 | Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.01.0001 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |
| | | | | Jumlah kajian manajemen lalu lintas yang diadakan | dokumen | 3 | 4 | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | BIDANG LL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|---|---|--------------|--------|------|---|---------|--------|------|------|------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.02.2.01 .0002 | Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG OPSDAL |
| | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi keselamatan lalu lintas | <i>orang</i> | 4000 | 4250 | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | BIDANG OPSDAL |
| | | 2.15.02.2.01 .0007 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG OPSDAL |
| | | | | Jumlah koordinasi wahana tata nugraha yang dilaksanakan | <i>kali</i> | 0 | 7 | Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | BIDANG OPSDAL |
| | | 2.15.02.2.02 | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|--|--|---------------|--------|------|--|---------------|--------|------|------|------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Prosentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | <i>Persen</i> | 100 | 100 | Prosentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | <i>Persen</i> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.02 .0001 | Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |
| | | | | Jumlah pagar pengaman jalan yang diadakan | <i>meter</i> | 70 | 72 | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | <i>unit</i> | 25 | 50 | 60 | 65 | 200 | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.02 .0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |
| | | | | Jumlah titik pju yang dilakukan pemeliharaan | <i>titik</i> | 3000 | 3200 | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | <i>unit</i> | 3300 | 3412 | 3489 | 3576 | 3576 | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.02 .0003 | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|---------------|--------|------|---|--------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Jumlah rambu keselamatan jalan yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1250 | 1275 | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | unit | 1285 | 1411 | 1537 | 1660 | 1660 | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.02.0004 | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |
| | | | | Luas marka jalan dan zona aman selamat sekolah yang diadakan | Meter Persegi | 5240 | 5320 | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 7291 | 7829 | 8650 | 9220 | 9220 | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.03 | Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persen | 100 | 100 | Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.03.0009 | Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah Terminal/ Shelter/ Halte yang dibangun | Unit | 0 | 0 | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | Unit | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|---|---|--------|--------|------|--|--------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.02.2.03.0011 | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | | | | | | | | | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | | | Jumlah terminal tipe c yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 4 | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | Unit | 4 | 34 | 40 | 46 | 46 | BIDANG ANGKUTAN DAN PKB |
| | | 2.15.02.2.04 | Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |
| | | | | Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persen | 100 | 100 | Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.04.0002 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|--------------|---|--|---------------|--------|------|--|----------------|--------|------|------|------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Jumlah petugas parkir yang mengikuti sosialisasi | <i>orang</i> | 850 | 875 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>laporan</i> | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.06 | Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |
| | | | | Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | <i>Persen</i> | 100 | 100 | Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | <i>Persen</i> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BIDANG LL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|--------|--------|------|--|---------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.02.2.06.0015 | Sub Kegiatan Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |
| | | | | Jumlah kasus lalu lintas yang diselesaikan dalam koordinasi lalu lintas antar stakeholder bidang perhubungan | Kasus | 6 | 6 | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | laporan | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.06.0016 | Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |
| | | | | Jumlah Rambu Keselamatan Jalan dan ATCS yang diadakan | Unit | 118 | 121 | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | BIDANG LL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|---|--|--------|--------|------|--|---------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.02.2.07 | Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |
| | | | | Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persen | 100 | 100 | Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BIDANG LL |
| | | 2.15.02.2.07.0006 | Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | | | | | | | | | | | | BIDANG LL |
| | | | | Juumlah pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kajian analisis dampak lalu lintas | Unit | 12 | 13 | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi | laporan | 10 | 11 | 12 | 13 | 46 | BIDANG LL |
| | | 2.15.05 | Program Pengelolaan Perkeretaapian | | | | | | | | | | | | BIDANG OPSDAL |
| | | | | Prosentase Kinerja layanan perkeretaapian | Persen | 100 | 100 | Prosentase Kinerja layanan perkeretaapian | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BIDANG OPSDAL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|--------------|--|--|---------------|--------|------|---|---------------|--------|------|------|------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.05.2.07 | Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapihan Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG OPSDAL |
| | | | | Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapihan Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persen</i> | 100 | 100 | Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapihan Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persen</i> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BIDANG OPSDAL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|---|---|--------|--------|------|---|---------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.05.2.07 .0002 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | BIDANG OPSDAL |
| | | | | Jumlah Fasilitas Penyeberangan Kereta yang dilakukan pemeliharaan | titik | 7 | 7 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | laporan | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | BIDANG OPSDAL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|---|--|--------|--------|------|---|--------|--------|------|------|------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.01 .0001 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|---------|--------|------|--|---------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | dokumen | 6 | 6 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.01.0006 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | dokumen | 5 | 5 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|---|---|---|--------|------|---|-------------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.01.2.02.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan | Pegawai | 45 | 50 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 51 | 56 | 57 | 58 | 58 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.02.0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas | Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan | 14 | 14 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | dokumen | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.02.0005 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|---------|--------|------|--|---------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun | dokumen | 1 | 1 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.05.0002 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan | Stel | 173 | 177 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 156 | 159 | 163 | 164 | 992 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.05.0009 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|---|---|---------|--------|------|---|--------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pegawai | 0 | 0 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 104 | 125 | 129 | 130 | 488 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.06.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik yang disediakan | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah komponen listrik yang disediakan | Buah | 20 | 20 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.06.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|--|---|--------|--------|------|--|--------|--------|------|------|------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan | unit | 4 | 5 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 8 | 12 | 12 | 12 | 53 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.06 .0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan | buah | 20 | 20 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 20 | 30 | 30 | 30 | 150 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.06 .0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah logistik kantor yang disediakan | Jenis | 76 | 76 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 76 | 76 | 76 | 76 | 456 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.06 .0005 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | Lembar | 1500 | 1500 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-----------------------|--|---|-----------|--------|------|---|---------|--------|------|------|------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.01.2.06 .0006 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan | eksemplar | 90 | 90 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.06 .0009 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti | kali | 27 | 30 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|--------|--------|------|---|--------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.07.0001 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | | Unit | 0 | 0 | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.07.0005 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah Mebel yang diadakan | Unit | 10 | 13 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 16 | 30 | 30 | 30 | 129 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 | 100 | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|--|----------|--------|------|--|---------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.15.01.2.08.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah surat keluar dan masuk yang dikelola | Surat | 3000 | 3010 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.08.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan | rekening | 3 | 3 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.08.0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara | Unit | 4 | 5 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | laporan | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.08.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|--|---|---------------|--------|------|---|----------------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan | <i>orang</i> | 12 | 12 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | <i>laporan</i> | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persen</i> | 100 | 100 | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persen</i> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.09.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan | Target | | Indikator Baru | Satuan | Target | | | | Kondisi Akhir | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|--------|---------|-------------------|---|---|--------|--------|------|--|--------|--------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | K | K | | | K | K | K | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi | unit | 31 | 33 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 33 | 32 | 38 | 42 | 42 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.09.0009 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 4 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SEKRETARIAT |
| | | 2.15.01.2.09.0011 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT |
| | | | | Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 15 | 16 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | SEKRETARIAT |

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/ urusan perhubungan untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Perubahan Rencana Strategis ini disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan perhubungan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang telah dispesifikasi dan telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Perubahan Rencana Strategis ini telah diselaraskan dengan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Sukoharjo.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 ini akan menjadi acuan dan tolok ukur resmi target serta penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Oleh sebab itu, Perubahan Rencana Strategis ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Sukoharjo.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja, RKA hingga DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan perhubungan dan atau target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yang telah dijabarkan dalam Renja, RKA dan DPA harus ditingkatkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan

menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pada akhirnya, komitmen dan semangat bersama untuk semakin lebih berkinerja adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !